Budiarsih, S.H., M. Hum., Ph. D lahir di Kabupaten Semarang, 28 November 1966. Menempuh pendidikan Sarjana (S1) di Undaris pada tahun 1989-1991, pendidikan Magister (S2) di Universitas Diponegoro pada tahun 2002-2004, dan menempuh pendidikan Doctor (S3) di UKM Malaysia pada tahun 2012-2017. Aktif menulis jurnal baik nasional maupun internasional.

Beberapa judul jurnal terkait hukum kesehatan yang pernah dibuat adalah "Solutions governance diminish corruption in public health care systems in Indonesia", "Integrasi Hukum Dan Sistem Kesehatan Di Indonesia: Satu Upaya Mewujudkan Universal Health Coverage 2019", Buku " Hukum dan Sistem Pembiayaan Kesehatan dan sebagai pembicara berbagai Procceding dan Webinar. Aktif mengajar sebagai dosen di berbagai perguruan tinggi. Pada tahun 1990-2017 menjadi dosen tetap di Fakultas SI dan S2 Hukum Undaris. Pada tahun 2-17-sekarang menjadi dosen tetap di Fakultas hukum Untag Surabaya sekaligus menjadi dosen tidak tetap di Fakultas Hukum Unisbank Semarang dan Universitas Lancang Kuning Pakanbaru Riau Sumatra

TINDAK PIDANA KHUSUS

Budiarsih, S.H., M.Hum., Ph.D

TINDAK PIDANA KHUSUS

Budiarsih, S.H., M.Hum., Ph.D

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

Kampus Untag Surabaya
Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya – 60119
Telp: 031-5931800 (Hunting)
Pesawat: 183
Fax: 031-5929767
Website: www.untag-sby.ac.id
E-mail: lpkm@untag-sby.ac.id

Buku ini di Persembahkan Untuk:
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Tempat Mengabdi di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
LPPM Untag yang memuat Buku ini
Mahasiswa sebagai Buku Bahan Ajar
Para Pembaca yang berminat mempelajari Hukum Tindak Pidana Khusus

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penulisan buku ajar Tindak Pidana Khusus. Buku ini disampaikan untuk memberikan gambaran apa saja yang termasuk kedalam tindak pidana khusus dan apa. Penulis menyadari banyak kekurangan dan keterbatasan sebagai manusia meskipun telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan penulis demi penyelesaian buku ajar ini.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang berperan dalam penulisan buku ini. Buku ini tidak akan berhasil tercapai bila tanpa bantuan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Penulis berharap buku ajar ini bisa menambah wawasan dan bisa menjadi bahan bacaan mahasiswa dan pembaca yang lainnya. Penulis juga berharap semoga buku referensi ini bisa diterima dengan baik dan bisa berguna baik bagi pembaca maupun bagi penulis.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan buku ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca sebagai masukan yang membangun untuk perbaikan kedepannya.

Salatiga, 25 Desember 2020

Budiarsih, S.H., M. Hum., Ph.D.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSEMBAHAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
I. RUANG LINGKUP TINDAK PIDANA KHUSUS	5
A. Pengertian	6
B. Ruang Lingkup.....	10
C. Informasi Elektronik dan/atau data Elektronik sebagai Alat Bukti	12
D. Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana.....	15
II. TINDAK PIDANA KORUPSI.....	17
A. Pengertian	18
B. Perkembangan Peraturan	25
C. Pembuktian Terbalik yang Terbatas	38
D. Peran Pembagian Beban Pembuktian untuk Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	46
III. TINDAK PIDANA GRATIFIKASI.....	48
A. Pengertian	50
B. Penggolongan Gratifikasi.....	52
C. Perkembangan Peraturan	54
IV. TINDAK PIDANA EKONOMI.....	58
A. Pengertian	60
B. Perkembangan Peraturan	62
V. TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	64
A. Pengertian	66
B. Tahapan-tahapan Pencucian Uang	67

C. Perkembangan Peraturan	69
VI. TINDAK PIDANA KESEHATAN	84
A. Pengertian.....	85
B. Perkembangan Peraturan	88
C. Ketentuan Hukum Upaya Kesehatan	106
VII. TINDAK PIDANA TERORISME.....	109
A. Pengertian.....	110
B. Program Deradikalisasi	115
C. Perkembangan Peraturan	120
DAFTAR PUSTAKA	129

TINDAK PIDANA KHUSUS

I. RUANG LINGKUP TINDAK PIDANA KHUSUS

Pengantar

Pada Bab pertama ini akan mempelajari tentang apa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Khusus dan Ruang lingkup dalam Tindak Pidana Khusus.

Sub-Sub Materi:

- Pengertian
- Ruang Lingkup
- Informasi Elektronik dan/atau data Elektronik sebagai Alat Bukti
- Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana

Tujuan Pembelajaran

Dengan mempelajari tindak pidana khusus diharapkan mahasiswa dapat memperoleh informasi yang seluas-luasnya mengenai definisi hukum pidana khusus Ruang Lingkup hukum pidana khusus, Informasi Elektronik dan/atau data Elektronik sebagai Alat Bukti dan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana.

Indikator Hasil Evaluasi Pembelajaran

1. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Definisi hukum pidana khusus dari beberapa ahli hukum pidana.
2. Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai ruang lingkup hukum pidana khusus
3. Mahasiswa dapat menjelaskan Pembuktian Terbalik yang Terbatas
4. Mahasiswa dapat menjelaskan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana

Metode Dan Strategi Proses Pembelajaran

- Metode Perkuliahan yaitu Problem Based Learning (PBL) pusat pembelajaran

ada pada mahasiswa. Metode yang diterapkan adalah “belajar” (Learning) bukan “mengajar” (Teaching).

- Strategi pembelajaran : kombinasi pertemuan tatap muka 50 % (menjelaskan materi kuliah) dan tutorial 50 % (kemampuan mahasiswa berdiskusi dalam menulis tugas-tugas).
- Media instruksional dengan media yang ada dimanfaatkan seperti media papan tulis, computer, LCD.

Materi

A. Pengertian

Tindak Pidana Khusus atau yang pertama kali dikenal dengan istilah Hukum Pidana

Khusus adalah Tindak Pidana yang ada diluar Hukum Pidana Umum. Tindak Pidana merupakan bagian dari Hukum Pidana. Sebelum masuk ke pembahasan Tindak Pidana Khusus perlu untuk membahas istilah pidana menurut

beberapa Ahli. Menurut Moeljatno Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk (Moeljatno, 1980a):

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan – larangan itu dapat dikenakan pidana sebagaimana yang telah diancamkan
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut

Menurut Van Hamel pidana menurut hukum positif adalah Sesuatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang

menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar sesuatu peraturan hukum yang ditegakkan oleh negara. (Lamintang, 1984)

Sedangkan menurut Simons Hukum Pidana adalah (Sudarto, 1990):

1. Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu “pidana” apabila tidak ditaati
2. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana
3. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana

Selain itu, Menurut Andi Hamzah pidana menurut Hukum Positif diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur bahwa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan, yang termasuk dalam pidana Pokok yaitu :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda

Sedangkan, pidana tambahan yakni:

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, berbeda dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (Crime atau Verbrechen atau misdad) yang diartikan secara kriminologis dan Psikologis. Tindak Pidana atau dikenal dengan istilah delik, berasal dari bahasa Latin yaitu Delictum. Delik dalam hukum merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana) (Sudarsono, 2007).

Sebagaimana termuat dalam KUHP sebagai ketentuan yang bersifat umum (*lex generalis*), meliputi waktu terjadinya (*Tempus delicti*) dan tempat terjadinya (*Locus Delicti*).

Tempat terjadinya perbuatan pidana dalam lingkup untuk:

1. Menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap perbuatan pidana tersebut (Pasal 2-8 KUHP);
2. Menentukan pengadilan mana yang harus mengurus perkaranya. Hal ini berhubungan dengan kompetensi relatif

Tempat terjadinya dikenal 3 teori, yaitu:

1. Teori perbuatan materiil, menurut teori ini yang menjadi tempat terjadinya ialah dimana tempat pembuat melakukan segala perbuatan yang kemudian dapat mengakibatkan delik yang bersangkutan
2. Teori alat yang dipergunakan, yang mengatakan bahwa delik dilakukan di tempat dimana alat yang dipergunakan itu menyelesaikannya, dengan lain perkataan yang menjadi *locus delicti* ialah tempat dimana ada alat yang dipergunakan
3. Teori akibat, menurut teori ini yang menjadi *locus delicti* ialah tempat akibat dari perbuatan itu terjadi

Adapun menurut Moeljatno mengatakan bahwa teori tentang *Locus Delicti* ada dua aliran yaitu (Moeljatno, 1980b):

1. Aliran yang menentukan di satu tempat, yaitu tempat dimana terdakwa berbuat.
2. Aliran yang menentukan di beberapa tempat yaitu mungkin tempat kelakuan, dan mungkin pula tempat akibat

Sedangkan terkait waktu terjadinya berhubungan dengan:

1. Pasal 1 KUHP, apakah perbuatan yang bersangkutan pada waktu itu sudah dilarang dan diancam dengan pidana?
2. Pasal 44 KUHP, apakah terdakwa ketika itu mampu untuk bertanggung jawab?

3. Pasal 45 KUHP, apakah terdakwa ketika melakukan perbuatan sudah berumur minimal 16 tahun atau belum, jika belum maka boleh memilih 3 kemungkinan yaitu:
 - a. Mengembalikan anak tersebut kepada orang tuanya tanpa diberi pidana apapun
 - b. Menyerahkan anak tersebut kepada pemerintah untuk dimasukkan rumah pendidikan
 - c. Menjatuhkan pidana seperti orang dewasa, maksimum pada pidana-pidana pokok dikurangi 1/3 (Pasal 47 KUHP)
4. Pasal 79 KUHP, dihitung mulai setelah perbuatan pidana terjadi

Pasal 1 angka 19 KUHP, ketentuan mengenai tertangkap tangan yaitu tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk turut melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu tindak pidana

Tindak Pidana Khusus adalah tindak pidana yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan memiliki ketentuan – ketentuan khusus acara pidana. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) atau *Wetboek van Strafrecht*, UU No. 1 tahun 1946 jo *Staatsblad* 1915 No. 732, telah dirumuskan sejumlah tindak pidana ditempatkan dalam buku II tentang kejahatan (*Misdrijven*) dan Buku III tentang pelanggaran (*Overtredingen*).

Apa yang menjadi kebutuhan untuk pengaturan bersifat komprehensif. dapat berbeda-beda antara satu tindak pidana dengan tindak pidana lainnya Tetapi semuanya memiliki kebutuhan untuk adanya sejumlah ketentuan khusus acara pidana, walaupun ketentuan khusus itu dapat berfaeda antara satu tindak pidana dengan tindak pidana lainnya.

Adanya sejumlah ketentuan khusus acara pidana ini merupakan karakteristik penting untuk tindak pidana khusus. Ini tidak berarti dalam suatu Undang-Undang, seperti UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah diatur

keseluruhan acara pidana. Dalam UU No. 5 Tahun 1997 hanya diatur beberapa saja ketentuan acara pidana. Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan berkenaan dengan tindak pidana psikotropika. pada umumnya tunduk pada ketentuan-ketentuan acara pidana dalam KUHP.

B. Ruang Lingkup

KUHP menggolongkan tindak pidana menjadi dua golongan yaitu kejahatan (*misdriften*) dan pelanggaran (*overtredigen*). Kejahatan diatur dalam Buku II KUHP dan kelompok tindak pidana yang termasuk didalamnya adalah:

1. Kejahatan Terhadap Keamanan negara (Bab 1, Pasal 104-129 KUHP)
2. Kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kewarganegaraan (Bab IV, Pasal 146-153 KUHP)
3. Kejahatan-kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala negara sahabat serta wakilnya (Bab III Pasal 139a-145)
4. Kejahatan terhadap ketertiban Umum (Bab V, Pasal 153bis-181 KUHP)
5. Kejahatan-kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden (Bab II, Pasal 130-139 KUHP)
6. Perkelahian Tanding (Bab VI, Pasal 181-186 KUHP)
7. Kejahatan yang membahayakan keamanan (Bab VII, Pasal 187-206 KUHP)
8. Kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII, Pasal 207-241 KUHP)
9. Sumpah palsu dan keterangan Palsu (Bab IX, Pasal 242-243 KUHP)
10. Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas (Bab X, Pasal 244-252 KUHP)
11. Pemalsuan materai dan Merk (Bab IX, Pasal 253-276 KUHP)
12. Pemalsuan Surat (Bab XII, Pasal 263-276 KUHP)
13. Kejahatan terhadap Asal-usul dan perkawinan (Bab XIII, Pasal 277-280 KUHP)
14. Kejahatan terhadap kesusilaan (Bab XIV, Pasal 281-303 KUHP)
15. Meninggalkan orang yang perlu ditolong (Bab XV, Pasal 304-309 KUHP)
16. Penghinaan (Bab XVI, Pasal 310-321 KUHP)
17. Membuka rahasia (Bab XVII, Pasal 322-323 KUHP)
18. Kejahatan terhadap kemerdekaan (Bab XVIII, Pasal 324-337 KUHP)

19. Kejahatan terhadap Nyawa (Bab XIX, Pasal 338-350 KUHP)
20. Penganiayaan (Bab XX, pasal 351-358 KUHP)
21. Menyebabkan Mati atau luka-luka karena kealpaan (Bab XXI, Pasal 359-361 KUHP)
22. Pencurian (Bab XXII, Pasal 362-367 KUHP)
23. Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII, Pasal 368-371 KUHP)
24. Penggelapan (Bab XXIV, Pasal 372-377 KUHP)
25. Perbuatan Curang (Bab XXV, Pasal 378-395 KUHP)
26. Perbuatan merugikan pemiutang atau orang yang mempunyai hak (Bab XXVI, pasal 396-405 KUHP)
27. Menghancurkan atau merusakkan barang (Bab XXVII, Pasal 406-412 KUHP)
28. Kejahatan jabatan (Bab XXVIII, Pasal 413-437 KUHP)
29. Kejahatan Pelayaran (Bab XXI, 438-479 KUHP)
30. Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana penerbangan (Bab XXIX A, Pasal 479a-479r KUHP)
31. Penadahan, Penerbitan dan Percetakan (Bab XXX, Pasal 480-488 KUHP)
32. Aturan tentang pengulangan kejahatan yang bersangkutan dengan berbagai bab (Bab XXXI, Pasal 486-488 KUHP)

Pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP, dan kelompok tindak pidana yang masuk golongan pelanggaran adalah:

1. Pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan (Bab I, Pasal 489-502)
2. Pelanggaran ketertiban umum (Bab II, Pasal 503-520 KUHP)
3. Pelanggaran terhadap penguasa (Bab III, pasal 503-520 KUHP)
4. Pelanggaran mengenai Asal-usul dan perkawinan (Bab IV, Pasal 529-530 KUHP)
5. Pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan (Bab V, Pasal 531 KUHP)
6. Pelanggaran kesusilaan (Bab VI, Pasal 532-547 KUHP)
7. Pelanggaran jabatan (Bab VII, pasal 552-559 KUHP)

8. Pelanggaran pelayanan (Bab IX, Pasal 560-569 KUHP)

Sedangkan, tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri di luar KUHPidana dan memiliki ketentuan khusus acara pidana, yaitu:

1. Tindak Pidana Ekonomi dalam UU No.7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana;
2. Tindak Pidana Korupsi;
3. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010;
4. Tindak Pidana Terorisme;
5. Tindak Pidana Psikotropika dalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
6. Tindak Pidana Narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
7. Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Informasi Elektronik dan/atau data Elektronik sebagai Alat Bukti

Dalam undang-undang mengatur tentang tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. salah satu ketentuan khusus acara pidana yang ada dalam beberapa undang-undang itu, yakni informasi elektronik dan/atau data elektronik sudah diakui sebagai alat bukti yang sah.

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada Pasal 44 ditentukan bahwa; Alat bukti penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut :

- Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan
- Alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Jadi, sebagai alat bukti dalam tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan, dalam hal ini KUHP juga diterima adanya alat bukti lain yang berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Pengertian informasi elektronik menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 11/2008. adalah 'satu atau sekumpulan data elektronik. termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."

Pengertian dokumen elektronik, menurut Pasal 1 angka 4. adalah "setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."

Beberapa ketentuan dalam undang-undang sebelumnya. yaitu:

1. Pasal 26 A UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No.31/1999 jo UU No. 20 Tahun 2001) menentukan bahwa: Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:
 - a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu
 - b. Dokumen yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Dalam UU No.20/2001, kedudukan dari informasi yang disimpan secara elektronik dan dokumen elektronik itu belum merupakan alat bukti yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari alat bukti petunjuk.

2. Pasal 72 UU No.10 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menentukan bahwa:

Alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana
- b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7.

Menurut Pasal 1 angka 7 UU No.15 Tahun 2002 (yang kemudian dalam UU No.25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No.15/2002 menjadi Pasal 1 butir 9) jo. Pasal 1 butir 16 UU No. 8 Tahun 2010 ditentukan bahwa:

Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- Tulisan, suara, atau gambar
- Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya
- Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang ini, kedudukan informasi elektronik dan dokumen elektronik telah merupakan alat bukti yang berdiri sendiri; bukan lagi merupakan bagian dari alat bukti petunjuk sebagaimana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

3. Dalam Perpu No.1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (yang menjadi Undang-Undang berdasarkan UU No.15 Tahun 2003), pada Pasal 27 ditentukan bahwa:

Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana
- b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu
- c. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang

tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

Tulisan, suara, atau gambar peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme ini juga informasi elektronik dan dokumen elektronik telah memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri.

D. Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana

Dalam beberapa Undang-Undang tentang Tindak Pidana Khusus yang lama, digunakan istilah berupa uraian yang panjang, yaitu:

1. Dalam UU No.7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, masih digunakan uraian yang panjang untuk menggambarkan apa yang dimaksudkan. Pada Pasal 15 ayat (1) dikatakan bahwa:

Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan-pidana dilakukan dan hukuman-pidana serta tindakan tata-tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu. baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak-pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya.

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi ini digunakan uraian 'suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan'.

2. Dalam Undang-Undang Narkotika yang lama, yaitu UU No. 9 Tahun 1976, juga digunakan istilah yang panjang, yaitu dalam 49 Undang-Undang ini dikatakan bahwa:

Jika suatu tindak pidana mengenai narkotika dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya

atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, maupun terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana narkoba itu atau yang bertindak sebagai pemimpin atau penanggungjawab dalam perbuatan atau kelalaian itu, ataupun terhadap kedua-duanya.

Dalam undang-undang ini digunakan istilah 'suatu badan hukum. suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan. Istilah ini sama dengan istilah yang digunakan dalam UU No.7/0rt/1955.

Dalam undang-undang Tindak Pidana Khusus yang lebih baru digunakan istilah korporasi. yaitu:

1. Dalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, pada Pasal 1 angka 13 dijelaskan bahwa Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik meaipakan badan hukum maupun bukan." Ketentuan lainnya dalam undang-undang ini:
 - a. Dalam Pasal 53 ayat (3) ditentukan bahwa "Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka di samping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)."
 - b. Dalam Pasal 70 ditentukan bahwa: 'Jika tindak pidana psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 dilakukan oleh korporasi, maka di samping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar 2 (dua) kali pidana denda yang beriakuk untuk tindak pidana tersebut dan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha."
2. Dalam Undang-Undang tentang Narkoba yang baru, yaitu UU No. 35 Tahun 2009, pada Pasal 1 angka 19 dijelaskan bahwa "Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dan orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan."
3. Dalam UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 1 butir 1 diberikan keterangan bahwa "Korporasi adalah kumpulan orang

dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (1) ditentukan bahwa "Dalam rial tindak pidana korupsi oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya."

4. Dalam UU No.18 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian uang pada Pasal 1 angka 9 dan angka 10 dijelaskan bahwa:
 - a. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi
 - b. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

II. TINDAK PIDANA KORUPSI

Pengantar

Korupsi merupakan tindakan penyelewengan atau menyalahgunakan uang perusahaan untuk mendapat keuntungan diri sendiri atau orang lain bahkan dapat dengan cara menggelapkan uang. Korupsi dapat mengubah perilaku seseorang yang awalnya bermoral menjadi tidak bermoral. Korupsi juga diartikan sebagai tindakan seseorang untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. Korupsi juga sebagai penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada pada dirinya dikarenakan jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan suatu keuangan perusahaan.

Sub-Sub Materi:

- Pengertian
- Perkembangan Peraturan
- Pembuktian Terbalik yang Terbatas
- Peran Pembagian Beban Pembuktian untuk Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tujuan Pembelajaran

Dengan mempelajari tindak pidana korupsi ini diharapkan mahasiswa dapat memperoleh informasi yang seluas-luasnya mengenai definisi hukum pidana korupsi, Perkembangan peraturan, Informasi Elektronik dan/atau data Elektronik sebagai Alat Bukti Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana.

Indikator Hasil Evaluasi Pembelajaran

1. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Definisi hukum pidana khusus dari beberapa ahli hukum pidana.
2. Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai ruang lingkup hukum pidana khusus
3. Mahasiswa dapat menjelaskan Pembuktian Terbalik yang Terbatas
4. Mahasiswa dapat menjelaskan Peran Pembagian Beban Pembuktian untuk Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Metode Dan Strategi Proses Pembelajaran

- Metode Perkuliahan yaitu Problem Based Learning (PBL) pusat pembelajaran ada pada mahasiswa. Metode yang diterapkan adalah “belajar” (Learning) bukan “mengajar” (Teaching).
- Strategi pembelajaran : kombinasi pertemuan tatap muka 50 % (menjelaskan materi kuliah) dan tutorial 50 % (kemampuan mahasiswa berdiskusi dalam menulis tugas-tugas).
- Media instruksional dengan media yang ada dimanfaatkan seperti media papan tulis, computer, LCD.

Materi

A. Pengertian

Pengertian Korupsi Menurut Nurdjana, korupsi berasal dari bahasa Yunani yaitu “corruptio” yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap,

tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama

materiil, mental dan hukum (Nurdjana, 2005).

Secara hukum, korupsi adalah "sebuah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan keuntungan yang tidak sesuai dengan

tugas resmi dan hak orang lain" Pasal 2 ayat (I) UU No. 21 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa orang yang dapat dipidana karena tindak pidana korupsi adalah "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi, 30 bentuk tindak pidana korupsi yaitu tersebar pada:

1. Kerugian Keuangan Negara

- Pasal 2;
- Pasal 3;

2. Suap Menyuap

- Pasal 5 ayat (1) huruf a
- Pasal 5 ayat (1) huruf b
- Pasal 13
- Pasal 5 ayat (2)
- Pasal 12 huruf a
- Pasal 12 huruf b
- Pasal 11
- Pasal 6 ayat (1) huruf a

- Pasal 6 ayat (1) huruf b
- Pasal 6 ayat (2)
- Pasal 12 huruf c
- Pasal 12 huruf d

3. Penggelapan dalam Jabatan

- Pasal 8
- Pasal 9
- Pasal 10 huruf a
- Pasal 10 huruf b
- Pasal 10 huruf c3

4. Pemerasan

- Pasal 12 huruf e
- Pasal 12 huruf g
- Pasal 12 huruf h

5. Perbuatan Curang

- Pasal 7 ayat (1) huruf a
- Pasal 7 ayat (1) huruf b
- Pasal 7 ayat (1) huruf c
- Pasal 7 ayat (1) huruf d
- Pasal 7 ayat (2)
- Pasal 12 huruf h

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan:

- Pasal 12 huruf i

7. Gratifikasi:

- Pasal 12 B jo. Pasal 12

Selain definisi tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jenis tindak

pidana lain itu tertuang pada Pasal 21, 22, 23, dan 24 Bab III UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi terdiri atas:

1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi: Pasal 21
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar: Pasal 22 jo. Pasal 28
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka: Pasal 22 jo. Pasal 29
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu: Pasal 22 jo. Pasal 35
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu: Pasal 22 jo. Pasal 36
6. Saksi yang membuka identitas pelapor: Pasal 24 jo. Pasal 31

Bahari dan Umam (2009) memisahkan jenis korupsi yang tersebar dalam pasal-pasal UU Tindak Pidana Khusus ke dalam 2 kelompok besar, yaitu (Khotibul, 2009)

1. Korupsi Aktif, yang terdiri dari:
 - a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
 - b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
 - c. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut;
 - d. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi

- e. Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya
- f. Setiap orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
- g. Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili
- h. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang
- i. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang
- j. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang
- k. pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut
- l. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi

- m. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut;
- n. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang :
- Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri
 - Pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang
 - Pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang
 - Pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
 - Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

2. Korupsi Pasif, yang terdiri dari:

- a. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya
- b. Hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, atau untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili
- c. Orang yang menerima penyerahan bahn bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan TNI dan atau kepolisian Negara RI dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a atau huruf c
- d. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya
- e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya
- f. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili
- g. Advokat yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau

pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili

- h. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

B. Perkembangan Peraturan

Perkembangan undang-undang pemberantasan korupsi di luar KUHPidana dapat diringkaskan sebagai berikut:

- Undang-undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam UU No.3 Tahun 1971, tindak pidana korupsi dirumuskan pada Pasal 1 ayat (1) yang menentukan bahwa dihukum karena tindak pidana korupsi yaitu:

- a. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
- b. Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau Perekonomian negara, bangsiapa melakukan kejahatan tercantum dalam pasal-pasal 209,210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 KUHP

- c. Barangsiapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam pasal 2 dengan mengingat sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu
 - d. Barang siapa tanpa alasan yang wajar. dalam waktu yang sesingkat-sesingkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya, seperti yang tersebut dalam pasal-pasal 418, 419 dan 420 KUHP tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib. Selain itu ada beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
- Dalam UU No.31 Tahun 1999. rumusan tindak pidana diatur dalam 2(dua) bab, yaitu Bab II: Tindak Pidana Korupsi, mencakup Pasal 2-20 dan Bab III: Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi. mencakup Pasal 21 - 24. Keseluruhan tindak pidana dalam UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 terdiri atas:
- Tindak Pidana Korupsi. Diatur dalam Bab II: Tindak Pidana Korupsi. mencakup Pasal 2 - 20. Tindak Pidana Khusus masih dapat dibedakan pula atas:
 - a. Tindak Pidana Khusus yang sejak semula diciptakan sebagai Tindak Pidana Khusus oleh Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Khusus. Termasuk di sini, yaitu:
 - Pasal 2 UU No.31 Tahun 1999: secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara. Tindak Pidana Khusus ini sudah ada dalam Pasal1 huruf a UU No.3 Tahun 1971.
 - Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999: dengan tujuan menguntungkan diri menyalahgunakan kewenangan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara. Tindak Pidana Khusus ini sudah ada dalam Pasal1 huruf b UU No.3 Tahun 1971.

- Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999: memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya.
- b. Tindak Pidana Khusus yang diambil dari rumusan tindak pidana dalam KUHPidana. Meliputi:
 - Menyuap pegawai negeri untuk sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001).
 - Menyuap hakim dan advokat (Pasal 6 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001)
 - Perbuatan curang berkenaan dengan penyerahan barang (Pasal 7 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001)
 - Pegawai negeri menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya (Pasal 8 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001)
 - Pegawai negeri memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001)
 - Pegawai negeri merusak surat bukti yang dikuasai karena jabatannya (Pasal 10 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001)
 - Pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa itu berhubungan dengan jabatannya (Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001)
 - Sembilan macam tindak pidana dalam Pasal 12 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001
 - Tindak pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi. Diatur dalam Bab III: Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi. mencakup Pasal 21 - 24.

Dalam bagian ini akan diuraikan mengenai Tindak Pidana Korupsi saja.

- a. Tindak Pidana Khusus Pasal 2 UU No.31 Tahun 1999: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1 000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Unsur-unsur Tindak Pidana Khusus pada pasal ini:

- Secara melawan hukum
- Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 ditentukan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3

Pada Pasal 2 ayat (2) UU No 31 Tahun 1999 ditentukan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Menurut penjelasan pasalnya, yang dimaksud dengan 'keadaan tertentu' dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Dalam UU No.20 Tahun 2001, pada Pasal 1 angka 1 dikatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) substansi tetap, penjelasan pasal diubah sehingga rumusannya sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal Demi Pasal angka 1 Undang-undang ini. Menurut Penjelasan Pasal Demi Pasal angka 1 ini, yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

- b. Tindak Pidana Khusus Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1 000.000.000.00 (satu miliar rupiah)

Unsur-unsur Tindak Pidana Khusus ini:

- Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
 - Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan
 - Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 4 UU No.31 Tahun 1999: ditentukan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- c. Tindak Pidana Khusus Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999: Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- d. Tindak Pidana Khusus Pasal 5 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001

Dalam UU No.20 Tahun 2001 pada Pasal I angka 2 dikatakan bahwa “Ketentuan Pasal 5, Pasal 6. Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11,

dan Pasal 12, rumusannya diubah dengan tidak mengacu pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diacu, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Pasal 5 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001:

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 5 UU No.31 Tahun 1999 sebelum perubahan: Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

e. Tindak Pidana Korupsi Pasal 6 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001

Pasal 6 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001:

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili
- Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan bermubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

(2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6 lama: Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

f. Tindak Pidana Korupsi Pasal 7 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001

Pasal 7 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001:

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):

- Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan,

melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang

- Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a
- Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barangkeperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
- Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barangkeperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkanperbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf

- (2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, diptdana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7 lama: Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 387 atau pasal 388 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000.00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

- g. Tindak Pidana Korupsi Pasal 8 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001

Pasal 8 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan

menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau" untuk sementara atau dengan sengaja menggelapkan uang, atau surat-berharga yang disimpan karena, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu melakukan tindak pidana tersebut. Pasal 8 lama: Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000.00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

h. Tindak Pidana Korupsi Pasal 9 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001

Pasal 9 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 9 lama : Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

i. Tindak Pidana Korupsi Pasal 10 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001

Pasal 10 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan

pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya
- b. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut
- c. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Pasal 10 lama: Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

- j. Tindak Pidana Korupsi Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001

Pasal V11 IJU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 11 lama: Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. dipidana

dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

k. Tindak Pidana Korupsi Pasal\12 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001

Pasal 12 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000 000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janjitersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidakmelakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengankewajibannya;
- Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya
- Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili
- Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mernpengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yangdiserahkan kepada pengadilan untuk diadili
- Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan

sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri

- Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggaranegara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya. padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang
- Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang
- Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun langsung dengan sengaja tunjkt serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Pasal 12 lama: Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423.

Pasal 425, atau Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- Pasal 14: Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang

tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

- Pasal 15: Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3.

Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16: Setiap orang diluar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya juga pada Pasal 1 butir 3 ditentukan bahwa diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 12 A, Pasal 12 B, dan Pasal 12 C. yang berbunyi sebagai berikut

Pasal 12 A

- (1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah)
- (2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah)

Pasal 12 B

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Yang nilainya Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

- b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 C

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak bertaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa telah terjadi perluasan dan rincian yang cukup besar mengenai cakupan tindak pidana korupsi.

C. Pembuktian Terbalik yang Terbatas

Dalam Pasal 66 KUHP ditentukan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Dengan kata lain, beban pembuktian berada pada Jaksa Penuntut Umum, yaitu Jaksa Penuntut Umum yang harus membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Terdakwa tidak memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Apabila terdakwa hendak membuktikan bahwa

dirinya tidak bersalah, maka hal itu merupakan hak dan terdakwa, bukan merupakan suatu kewajiban.

Tetapi. dalam UU No.3 Tahun 1971, UU No.31 Tahun 1999 dan UU No 20 Tahun 2001 terdapat ketentuan khusus mengenai pembagian beban pembuktian. Bagaimana pembagian beban pembuktian dalam ketiga undang-undang tersebut akan dibahas satu persatu berikut ini.

1. Dalam UU No.3 Tahun 1971.

Beban pembuktian diatur pada Pasal 17 yang menentukan sebagai berikut

- (1) Hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Keterangan tentang pembuktian yang dikemukakan oleh terdakwa bahwa ia tidak bersalah seperti dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperkenankan dalam hal:
 - Apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan bahwa perbuatannya itu menurut keinsyafan yang wajar tidak merugikan keuangan dan perekonomian negara atau
 - Apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan. Bahwa perbuatannya itu dilakukan demi kepentingan umum.
- (3) Dalam hal terdakwa dapat memberi keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (1) maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang setidak-tidaknya menguntungkan baginya. Dalam hal demikian Penuntut Umum tetap mempunyai kewenangan untuk memberikan pembuktian yang bertawanan.
- (4) Apabila terdakwa tidak dapat memberi keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (1) maka keterangan tersebut dipandang sebagai hal yang setidak-tidaknya merugikan baginya. Dalam hal demikian Penuntut Umum tetap diwajibkan memberi pembuktian bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi. (Saleh, 1977)

Dalam bagian Penjelasan terhadap Pasal 17 ayat (1) dikatakan bahwa, Aturan mengenai pembebanan pembuktian tidak diikuti sepenuhnya meskipun hal ini tidak berarti bahwa pasal ini menghendaki suatu pembuktian yang terbalik.

Pembuktian yang terbalik akan mengakibatkan Penuntut Umum dibebaskan dan kewajiban untuk membuktikan terhadap salah atau tidaknya seorang terdakwa. dan terdakwa sebaliknya dibebani pembuktian tentang salah atau tidaknya.

Dalam pasal ini Hakim memperkenankan terdakwa memberi keterangan tentang pembuktian yang tidak merupakan alat bukti menurut hukum, tetapi segala sesuatu yang dapat lebih memberikan kejelasan membuat terang tentang duduknya suatu perkara.¹

Terhadap Ayat (3) dari Pasal 17, dalam bagian Penjelasan diberikan keterangan, keterangan pembuktian itu adalah bahan penilaian bagi Hakim yang dapat dipandang sebagai hal yang menguntungkan atau merugikan terdakwa. Keterangan yang menguntungkan atau merugikan tersebut bukanlah sesuatu yang mengandung di dalamnya suatu penghukuman atau pembebasan dari penghukuman. Apabila terdakwa dapat memberikan keterangan tentang pembuktian Penuntut Umum tetap mempunyai kewenangan untuk memberikan pembuktian yang bertawanan.

Terhadap ayat (2) dan ayat (4) dari Pasal 17 ini, dalam Penjelasan Pasal Demi Pasal hanya diberikan catatan 'Cukup Jelas'. Pokok-pokok penting yang merupakan hakekat (substansi) dari Pasal 17 Undang-undang No.3 Tahun 1971 ini adalah sebagai berikut :

- Penuntut Umum tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana korupsi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (4) UU No.3 Tahun 1971.
- Terdakwa dapat diperkenankan dan Hakim untuk memberikan keterangan tentang pembuktian' bahwa ia tidak bersalah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (1) UU No.3 Tahun 1971). Menurut penjelasan pasal. •keterangan tentang pembuktian' ini tidak merupakan alat bukti menurut hukum. tetapi* segala sesuatu yang dapat lebih memberikan kejelasan membuat terang tentang duduknya suatu perkara.

- Keterangan tentang pembuktian" dari terdakwa tidak membawa konsekuensi dihukum atau dibebaskannya terdakwa. Menurut Penjelasan Pasal 17 ayat 3. konsekuensinya hanyalah menguntungkan terdakwa jika menurut penilaian Hakim si terdakwa dapat memberikan keterangan tentang pembuktian. atau merugikan terdakwa. jika menurut penilaian Hakim si terdakwa tidak dapat memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi. tetapi konsekuensi-konsekuensi ini tidak sampai pada membebaskan atau sebaliknya menghukum terdakwa
- Terdakwa berhak membuktikan dirinya tidak bersalah melakukan perbuatan pidana korupsi.

Dalam Pasal 17 UU No 3 Tahun Tetapi. hak paling dasar seorang terdakwa adalah hak untuk membela diri. Oleh karena itu senarusnya terdakwa tetap memiliki hak untuk membela diri dengan mengemukakan bahwa dirinya tidak bersalah dan untuk itu berhak mengajukan alat-alat bukti yang sah menurut hukum. Jika menurut penilaian Hakim bahwa terdakwa dapat memberikan pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah bahwa dirinya tidak bersalah, maka Hakim seharusnya membebaskan terdakwa atau melepaskannya dari segala tuntutan hukum.

Pembagian beban pembuktian dalam Pasal 17 UU No.3 Tahun 1971 bukan merupakan pembalikan beban pembuktian (*omkering van de bewijslast*) melainkan hanya suatu penyimpangan beban pembuktian.

Menurut Penjelasan Pasal 17 ayat (1). aturan mengenai pembebanan pembuktian tidak diikuti sepenuhnya meskipun hal ini tidak berarti bahwa pasal ini menghendaki suatu pembuktian yang terbalik. Pembuktian yang terbalik akan mengakibatkan Jaksa Penuntut Umum dibebaskan dari kewajiban untuk membuktikan terhadap salah atau tidaknya seorang terdakwa. dan terdakwa sebaliknya yang dibebani kewajiban pembuktian tentang salah atau tidaknya

2. UU No. 31 Tahun 1999. Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, cara pembagian beban pembuktian diatur dalam Pasal 37. Dalam pasal ini ditentukan sebagai berikut,
 - (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.

- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.
- (3) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (5) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Dalam bagian Penjelasan terhadap Pasal 37 UU No.31 Tahun 1999 ini diberikan penjelasan bahwa,

Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan dakwaan. Menurut ketentuan ini, penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya.

Dalam bagian Penjelasan Umum dikatakan bahwa undang-undang ini menganut "pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang".

Pokok-pokok penting yang merupakan hakekat (substansi) dari Pasal 37 UU No.31 Tahun 1999 ini adalah sebagai berikut :

- Penuntut Umum tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana korupsi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 37 ayat (5) UU No.37 Tahun 1999.

- Terdakwa dibebani kewajiban untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan. Hal ini ditentukan dalam Pasal 37 ayat (3) UU No.31 Tahun 1999.
- Jika terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya. maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini ditentukan dalam Pasal 37 ayat (4) UU No.31 Tahun 1999.
- Jika terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya. Kata 'membuktikan' menunjukkan bahwa terdakwa menggunakan alat-alat bukti yang sah. bukan hanya keterangan tentang pembuktian sebagaimana pada Pasal 17 UU No.3 Tahun 1971. Secara penafsiran tata bahasa, pasal ini telah menutup kemungkinan pembebasan seorang terdakwa dari dakwaan tindak pidana korupsi. Sekalipun terdakwa dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah dapat membuktikan dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi hal ini hanya membawa konsekuensi 'menguntungkan' saja tetapi tidak membebaskannya dari dakwaan.

Pembagian beban pembuktian dalam Pasal 37 UU No.31 Tahun 1999 merupakan pembuktian terbalik yang terbatas atau berimbang.

Nama 'pembuktian terbalik yang terbatas atau berimbang' ini dapat ditemukan dalam bagian Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal 37.

3. UU No.20 Tahun 2001. Pada Pasal 1 butir 5 UU No.20 Tahun 2001 diberikan ketentuan bahwa,

Pasal 37 dipecah menjadi 2 (dua) pasal yakni menjadi Pasal 37 dan Pasal 37 A dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pasal 37 dengan substansi yang berasal dari ayat (1) dan ayat(2) dengan penyempurnaan pada ayat (2) frasa yang berbunyi "keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya" diubah menjadi "pembuktian tersebut

digunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti", sehingga bunyi keseluruhan Pasal 37 adalah sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
 - (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.
- Pasal 37 A dengan substansi yang berasal dari ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dengan penyempurnaan kata "dapat pada ayat (4) dihapus dan penunjukan ayat (1) dan ayat (2) pada ayat (5) dihapus serta ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) masing-masing berubah menjadi ayat (1) ayat (2), dan ayat (3), sehingga bunyi keseluruhan Pasal 37 A adalah sebagai berikut

Pasal 37 A

- (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Terhadap Pasal 37 ayat (1) diberikan keterangan dalam Penjelasan pasal bahwa pasal ini sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang

berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan menyalahkan diri sendiri (non self-incrimination). Sedangkan teradap ayat (2) diberi keterangan bahwa ketentuan ini tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang (negatiefwettelijk).

Pokok-pokok penting yang merupakan hakekat (substansi) dan Pasal 37 dan 37 A UU No. 37 Tahun 1999 yang merupakan perubahan yang ditentukan oleh UU No. 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut :

- Penuntut Umum tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana korupsi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 37 A ayat (3) UU No.37 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.
- Terdakwa dibebani kewajiban memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan. Hal ini ditentukan dalam Pasal 37 A ayat (1) UU No.37 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001.
- Jika terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya. maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini ditentukan dalam Pasal 37 A ayat (2) UU No.37 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001.
- Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Hal ini ditentukan dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU No.37 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001.

Ketentuan ini dapat dikatakan merupakan koreksi terhadap rumusan Pasal 37 ayat (2) UU No 37 Tahun 1999 yang sebelumnya memberi kesan menutup sama sekali kemungkinan pembebasan seorang terdakwa perkara tindak pidana korupsi.

Dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 dikatakan bahwa pasal ini (Pasal 37 ayat 1) sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang pembagian beban pembuktian dalam Pasal 37 dan Pasal 37 A sebagai 'pembuktian terbalik'.

Tetapi, menurut penulis, sebenarnya beban kewajiban pembuktian pada terdakwa dalam UU No.37 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 ini tidak berbeda dengan kewajiban beban pembuktian terdakwa dalam Pasal 37 dari UU No.37 Tahun 1999, sehingga pembagian beban pembuktian ini lebih tepat untuk tetap dinamakan pembuktian terbalik yang terbatas atau berimbang.

D. Peran Pembagian Beban Pembuktian untuk Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pada bagian menimbang huruf (a) dari UU No.20 Tahun 2001 dikatakan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah menerapkan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Sekalipun dikatakan bahwa Pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan secara luar biasa tetapi undang-undang ini mengenal pembatasan contohnya untuk pembagian beban pembuktian, sekalipun menyimpang dari ketentuan dalam KUHAP tetapi tidak sampai merupakan pembuktian terbaliknya melainkan pembuktian terbalik yang terbatas atau berimbang.

Hal yang serupa telah dikemukakan oleh Oemar Seno Adji, saat memberikan komentar mengenai beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi dalam Pasal 17 RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tahun 1971 Dikatakan oleh Oemar Seno Adji bahwa.

Dengan tujuan untuk mempercepat prosedur dan menyederhanakan atau mempermudah pembuktian, RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menempuh jalan dengan membuka pintu bagi ketentuan-ketentuan

yang menyimpang dari acara biasa dan pada saat yang bersamaan dengan memberikan kewenangan yang exceptionil kepada justitie dan politik. Namun demikian. ia sekedar merupakan penyimpangan, pengurangan dari hak-hak asasi seorang terdakwa dalam suatu proses pidana, tanpa "overgaan" pada suatu penyimpangan seluruhnya hak-hak tersebut Oleh karena itu, ia tidak akan mengarah dalam seal pembuktian pada pembalikan pembuktian, pada 'shifting of the burden of proof' seperti pernah dijalankan oleh Inggris dan Malaysia (tahun 1916 dan 1961). Dengan tidak mengikuti pula hukum pembuktian biasa, ia menempuh jalannya sendiri dalam pasal 17 RUU tersebut

Penyimpangan hak asasi sebagai suatu keseluruhan, dalam hal ini asas 'presumption of innocence' dan 'non-selfincrimination' dapat dipertimbangkan dengan menghantar hukum darurat dan selama situasi demikian belum tampak, maka penyimpangan hak demikian kiranya kurang dapat dibenarkan (Adji, 1976)

Sekarang ini, sebagaimana telah dikemukakan dalam sub bab sebelumnya dalam Pasal 37 A UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. kepada terdakwa telah diletakkan beban kewajiban pembuktian yang lebih berat lagi daripada dalam UU No.3 Tahun 1971. Terdakwa diwajibkan untuk membuktikan dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah tentang asal usul kekayaannya. Jika ia tidak dapat membuktikan asal usul kekayaannya dengan alat-alat bukti yang sah makahal itu dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Peran dari Pasal 37 A UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat dilihat dari dua aspek, yaitu

1. Pembuktian dakwaan tindak pidana korupsi; dan
2. Pemberantasan tindak pidana korupsi secara umum berupa pengembalian kerugian negara.

Dari aspek pembuktian dakwaan, ketidakmampuan terdakwa dakwaannya dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Suatu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa ketidak mampuan untuk membuktikan tentang asal usul dari harta kekayaannya dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah yang memberatkan dirinya, yaitu

alat bukti keterangan terdakwa, yang merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam ketentuan KUHP. Dengan demikian peran Pasal 37 A UU No.31 Tahun 1999 jo UU NO. 20 Tahun 2001 adalah untuk mempermudah pembuktian dakwaan tindak pidana korupsi.

Peran Pasal 37 A UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 karena dengan aspek pemberantasan tindak pidana korupsi secara umum yang berupa pengembalian kerugian negara, merupakan pokok yang penting.

Pada dasarnya. Penuntut Umum dengan menggunakan alat-alat bukti yang dihipunkannya relatif mudah membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Tetapi lebih sulit untuk membuktikan ke mana hasil korupsi disimpan atau disembunyikan oleh seorang terdakwa. Dengan adanya Pasal 37 A UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 31 jika terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidakseimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan.

III. TINDAK PIDANA GRATIFIKASI

Pengantar

Gratifikasi erat kaitannya dengan hadiah atau pemberian yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Mungkin masyarakat mengira hal ini tentu melanggar hukum. Tetapi ternyata tidak semua gratifikasi adalah ilegal atau sebuah kesalahan. Situs Pusat Edukasi Anti-Korupsi KPK menuliskan, setiap tindakan yang memiliki indikasi gratifikasi kepada para pejabat atau pegawai negeri akan dianalisa untuk memastikan apakah tindakan tersebut ilegal.

Sub-Sub Materi:

- Pengertian
- Penggolongan Gratifikasi
- Perkembangan Peraturan

Tujuan Pembelajaran

Dengan mempelajari tindak pidana korupsi ini diharapkan mahasiswa dapat memperoleh informasi yang seluas-luasnya mengenai definisi hukum pidana Gratifikasi, Perkembangan peraturan, Penggolongan Gratifikasi, Perkembangan Peraturan.

Indikator Hasil Evaluasi Pembelajaran

1. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Definisi hukum pidana khusus dari beberapa ahli hukum pidana.
2. Mahasiswa dapat menjelaskan Penggolongan Gratifikasi
3. Mahasiswa dapat menjelaskan Perkembangan Peraturan dalam tindak pidana Gratifikasi

Metode Dan Strategi Proses Pembelajaran

- Metode Perkuliahan yaitu Problem Based Learning (PBL) pusat pembelajaran ada pada mahasiswa. Metode yang diterapkan adalah “belajar” (Learning) bukan “mengajar” (Teaching).
- Strategi pembelajaran : kombinasi pertemuan tatap muka 50 % (menjelaskan materi kuliah) dan tutorial 50 % (kemampuan mahasiswa berdiskusi dalam menulis tugas-tugas).

Media instruksional dengan media yang ada dimanfaatkan seperti media papan tulis, computer, LCD.

Materi

A. Pengertian

Dalam UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan,

perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Tindakan gratifikasi dilarang karena dapat mendorong penyelenggara negara atau pegawai negeri untuk bersikap tidak objektif, tidak adil, dan tidak profesional dalam melakukan pekerjaannya. Hal ini dapat membuat para petugas negara tersebut tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik

Buku Saku Memahami Gratifikasi (2014), dalam Pasal 12 B Ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 dijelaskan pengertian gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya (KPK, 2014). Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Apabila dicermati penjelasan pasal 12B Ayat (1) di atas, kalimat yang termasuk definisi gratifikasi adalah sebatas kalimat: pemberian dalam arti luas, sedangkan kalimat setelah itu merupakan bentuk-bentuk gratifikasi. Dari penjelasan pasal 12B Ayat (1) juga dapat dilihat bahwa pengertian gratifikasi mempunyai makna yang netral, artinya tidak terdapat makna tercela atau negatif dari arti kata gratifikasi tersebut. Apabila penjelasan ini dihubungkan dengan rumusan pasal 12B dapat dipahami bahwa tidak semua gratifikasi itu bertentangan dengan hukum, melainkan hanya gratifikasi yang memenuhi kriteria dalam unsur

pasal 12B saja. Uraian lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada bagian selanjutnya.

Dikutip dari situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi, gratifikasi disebut juga suap yang tertunda atau suap terselubung. Gratifikasi sering dianggap sebagai akar korupsi. Dikhawatirkan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terbiasa menerima gratifikasi lama kelamaan terjerumus melakukan korupsi bentuk lain seperti suap, pemerasan dan lainnya. Gratifikasi dilarang karena mendorong pegawai negeri atau penyelenggara negara bersikap tidak obyektif, tidak adil dan tidak profesional. Akibatnya, pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Di dalam buku saku memahami gratifikasi dari KPK (hal. 19) diuraikan contoh-contoh pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang sering terjadi, yaitu(KPK, 2014):

1. Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya
2. Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut
3. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma
4. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang dari rekanan
5. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat
6. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan
7. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja
8. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu

Akan tetapi, menurut Pasal 12C ayat (1) UU Tipikor, gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak akan dianggap sebagai suap apabila penerima gratifikasi melaporkan kepada KPK. Pelaporan tersebut paling lambat adalah 30 hari sejak tanggal diterimanya gratifikasi (Pasal 12C ayat [2] UU Tipikor).

Gratifikasi yang dilakukan jika ada hubungannya dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau penjara paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.juta rupiah, dan paling banyak Rp.1 Miliar rupiah.

B. Penggolongan Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Maka gratifikasi bersifat netral sehingga tidak semua gratifikasi dilarang atau salah. Berikut ini perbedaan antara gratifikasi yang dilarang dan yang boleh diterima:

- Gratifikasi yang dilarang

Gratifikasi yang dilarang adalah yang memenuhi kriteria :

1. Gratifikasi yang diterima berhubungan dengan jabatan.
2. Penerimaan tersebut dilarang oleh peraturan yang berlaku, bertentangan dengan kode etik, memiliki konflik kepentingan atau merupakan penerimaan yang tidak patut atau tidak wajar.

- Gratifikasi yang boleh diterima

Gratifikasi yang boleh diterima memiliki karakteristik :

1. Berlaku umum yaitu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan.
2. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-udnangan yang berlaku
3. Dipandang sebagai wujud ekspresi, keramah-tamahan, penghormatan dalam hubungan sosial antar sesama dalam batasan nilai yang wajar
4. Merupakan bentuk pemberian yang berada dalam ranah adat istiadat kebiasaan dan norma yang hidup di masyarakat dalam batasan nilai yang wajar.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, Bab II pasal 2, penyelenggara negara yang dilarang menerima gratifikasi meliputi :

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara

2. Menteri
3. Gubernur
4. Hakim
5. Duta Besar
6. Wakil Gubernur
7. Bupati atau Wali Kota dan Wakilnya

Pejabat lainnya yang memiliki fungsi strategis juga dilarang menerima gratifikasi, yaitu :

1. Komisaris Direksi, dan Pejabat Struktural pada BUMN dan BUMD
2. Pimpinan Bank Indonesia
3. Pimpinan Perguruan Tinggi
4. Pimpinan Eselon Satu dan Pejabat lainnya yang disamakan pada lingkungan Sipil dan Militer
5. Jaksa
6. Penyidik
7. Panitera Pengadilan
8. Pimpinan Proyek atau Bendaharawan Proyek
9. Pegawai Negeri

Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan No. 20 tahun 2001, pegawai negeri yang dilarang menerima gratifikasi meliputi :

1. Pegawai pada MA, MK
2. Pegawai pada Lembaga Kementerian/Departemen & LPND
3. Pegawai pada Kejaksaan
4. Pegawai pada Bank Indonesia
5. Pimpinan dan Pegawai pada Sekretariat MPR/DPR/DPD/DPRD Propinsi/Dati II
6. Pegawai pada Perguruan Tinggi
7. Pegawai pada Komisi atau Badan yang dibentuk berdasarkan UU, Keppres maupun PP

8. Pimpinan dan pegawai pada Sekr. Presiden, Sekr. Wk. Presiden, Sekkab dan Sekmil Pegawai pada BUMN dan BUMD
9. Pegawai pada Badan Peradilan Anggota TNI dan POLRI serta
10. Pegawai Sipil di lingkungan TNI dan POLRI
11. Pimpinan dan Pegawai dilingkungan Pemda Dati I dan Dati II

Penerima gratifikasi melaporkan pada KPK paling lambat 30 hari kerja maka dibebaskan dari ancaman pidana gratifikasi. Ketentuan mengenai gratifikasi menurut UU tersebut adalah:

1. Bila nilai gratifikasi Rp 10 juta atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi
2. Bila nilai kurang dari Rp 10 juta, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum
3. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dengan denda minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar

C. Perkembangan Peraturan

Menurut ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 12 huruf a dan huruf b UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”), baik pelaku pemberi maupun penerima gratifikasi diancam dengan hukuman pidana.

- Pasal 5 UU Tipikor

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

1. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya

2. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- Pasal 12 UU Tipikor

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) :

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya
2. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya

Yang dimaksud dengan “penyelenggara negara” disebutkan dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU Tipikor adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yaitu:

- Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara
- Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara
- Menteri
- Gubernur
- Hakim
- Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (Pasal 12B ayat [1] UU Tipikor). Secara logis, tidak mungkin dikatakan adanya suatu penyuapan apabila tidak ada pemberi suap dan penerima suap.

Pasal 12 B

- 1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasitersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. Yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- 2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggaran negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 12 C

- 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima

- 3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- 4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Indikator Peraturan

Gratifikasi saat ini diatur di dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Beberapa gambaran yang dapat digunakan untuk lebih memahami mengapa gratifikasi perlu diatur dalam suatu peraturan yaitu :

- **Perkembangan Praktik Pemberian Hadiah**

Perkembangan praktik terkini pemberian hadiah di Indonesia diungkapkan oleh Verhezen (2003), Harkristuti (2006) dan Lukmantoro (2007). Verhezen dalam studinya mengungkapkan adanya perubahan mekanisme pemberian hadiah pada masyarakat Jawa modern yang menggunakan hal tersebut sebagai alat untuk mencapai tujuan bagi pegawai-pegawai pemerintah dan elit-elit ekonomi (Verhezen, 2003).

Pemberian hadiah (Gratifikasi) dalam hal ini berubah menjadi cenderung ke arah suap. Dalam konteks budaya Indonesia dimana terdapat praktik umum pemberian hadiah pada atasan dan adanya penekanan pada pentingnya hubungan yang sifatnya personal, budaya pemberian hadiah menurut Verhazen lebih mudah mengarah pada suap.

Penulis lain, Harkristuti (2006) terkait pemberian hadiah mengungkapkan adanya perkembangan pemberian hadiah yang tidak ada kaitannya dengan hubungan atasan-bawahan, tapi sebagai tanda kasih dan apresiasi kepada seseorang yang dianggap telah memberikan jasa atau memberi kesenangan pada sang pemberi hadiah.

- **Konflik Kepentingan Gratifikasi**

Salah satu kajian yang dilakukan oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK (2009) mengungkapkan bahwa pemberian hadiah atau gratifikasi yang diterima oleh penyelenggara negara adalah salah satu sumber penyebab timbulnya konflik kepentingan. Konflik kepentingan yang tidak ditangani dengan baik dapat berpotensi mendorong terjadinya tindak pidana korupsi.

Definisi konflik kepentingan adalah situasi dimana seseorang Penyelenggara Negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.

Situasi yang menyebabkan seseorang penyelenggara Negara menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan merupakan salah satu kejadian yang sering dihadapi oleh penyelenggara negara yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Beberapa bentuk konflik kepentingan yang dapat timbul dari pemberian gratifikasi ini antara lain adalah:

Penerimaan gratifikasi dapat membawa Kepentingan terseamar (vested interest) dan kewajiban timbal balik atas sebuah pemberian sehingga independensi penyelenggara negara dapat terganggu; Penerimaan gratifikasi dapat mempengaruhi objektivitas dan penilaian profesional penyelenggara negara; Penerimaan gratifikasi dapat digunakan sedemikian rupa untuk mengaburkan terjadinya tindak pidana korupsi; dan lain-lain.

IV. TINDAK PIDANA EKONOMI

Pengantar

Tindak pidana ekonomi diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955, KUHP secara limitatif, dan beberapa peraturan perundangan lainnya di luar KUHP. Pembahasan mengenai RKUHP menimbulkan pertanyaan apakah KUHP akan memperbaharui Undang Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 dan

mengkompilasi seluruh tindak pidana ekonomi yang tersebar di berbagai peraturan perundangan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tulisan ini akan mencoba menjawab dengan membahas dua unsur yaitu memetakan tindak pidana ekonomi di dalam RKUHP dan masalah-masalah yang dapat terjadi berkaitan dengan tindak pidana ekonomi.

Sub-Sub Materi:

- Pengertian
- Perkembangan Peraturan

Tujuan Pembelajaran

Dengan mempelajari tindak pidana korupsi ini diharapkan mahasiswa dapat memperoleh informasi yang seluas-luasnya mengenai definisi hukum pidana ekonomi, Perkembangan peraturan tindak pidana ekonomi.

Indikator Hasil Evaluasi Pembelajaran

1. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Definisi hukum pidana khusus dari beberapa ahli hukum pidana.
2. Mahasiswa dapat menjelaskan Pengertian Tindak Pidana Ekonomi
3. Mahasiswa dapat menjelaskan Perkembangan Peraturan dalam tindak pidana Ekonomi

Metode Dan Strategi Proses Pembelajaran

- Metode Perkuliahan yaitu Problem Based Learning (PBL) pusat pembelajaran ada pada mahasiswa. Metode yang diterapkan adalah “belajar” (Learning) bukan “mengajar” (Teaching).
- Strategi pembelajaran : kombinasi pertemuan tatap muka 50 % (menjelaskan materi kuliah) dan tutorial 50 % (kemampuan mahasiswa berdiskusi dalam menulis tugas-tugas).
- Media instruksional dengan media yang ada dimanfaatkan seperti media papan tulis, computer, LCD.

Materi

A. Pengertian

Hukum pidana ekonomi adalah bagian dari hukum pidana yang mempunyai ciri

tersendiri yaitu sifat ekonomisnya.

Banyak para praktisi dan akademisi memberikan definisi tentang apa itu tindak pidana ekonomi, (Kartun. S, 2003)namun, secara umum, tindak pidana ekonomi dibagi menjadi dua pengertian: pengertian dalam arti

sempit dan arti luas. Terlepas dari perbedaannya, kedua pengertian itu mempunyai persamaan yaitu keduanya mempunyai motif ekonomi dan/atau mempunyai pengaruhnegatif terhadap kegiatan perekonomian dan keuangan negara serta dunia usaha(Hamzah, 2017). Tindak pidana di bidang perekonomian dalam arti sempit adalah seluruh tindakan yang tercantum Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.Tindak pidana jenis ini disebut sempit karena secara substansial memua sebagian kecil dari kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Undangundang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei tahun 1955 karena keadaan yang mendesak yang diakibatkan oleh kesulitan ekonomi pada saat itu. Undang-undang ini dikeluarkan dengan harapan dapat mencegah terjadinya kerugian negara pada saat itu. Menurut Undang-undang Darurat itu, yang dimaksud dengan tindak pidana ekonomi adalah:

1. Tindak pidana ekonomi berdasarkan pasal 1 sub 1e:
 - a. pelanggaran di bidang devisa
 - b. pelanggaran terhadap prosedur impor, ekspor/Penyelundupan;
 - c. pelanggaran izin
 - d. pelanggaran ketentuan barang-barang yang diawasi.⁸
2. Tindak pidana ekonomi berdasarkan pasal 1 sub 2 e meliputi:
 - a. pasal 26, dengan sengaja tidak memenuhi tuntutan pegawaipengusut berdasarkan suatu ketentuan dalam undang–undang

b. pasal 32, dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan :

- suatu hukuman tambahan sebagai tercantum dalam pasal 7 sub s, b, dan c
- suatu tindakan tata tertib sebagai tercantum dalam pasal 8
- suatu peraturan termaksud dalam pasal 10
- suatu tindakan tata tertib sementara atau menghindari hukuman tambahan / tindakan tata tertib sementara seperti tersebut diatas.
- pasal 33, dengan sengaja baik sendiri maupun perantara orang lain menarik bagian – bagian kekayaan untuk dihindarkan dari : tagihan – tagihan, pelaksanaan suatu hukuman atau tindakan tata tertib sementara, yang dijatuhkan berdasarkan undang – undang

3. tindak pidana ekonomi berdasarkan pasal 1 sub 3e: Pelanggaran sesuatu ketentuan dalam undang – undang lain dan berdasarkan undang – undang lain.

Undang-undangan Darurat No. 7 tahun 1955 dalam perkembangannya telah mengalami perubahan dan penambahan.¹¹ Namun Undang-undang Darurat ini tidak pernah dicabut walaupun sudah lama mandul dan tidak diterapkan.¹² Hal ini tidak terlepas dari tujuan pembuat undang-undang yang menyatakan bahwa tindak pidana ekonomi hanya memiliki sifat temporer atau sementara, artinya undang-undang tersebut hanya difungsikan pada saat negara dalam keadaan kesulitan ekonomi dan sampai keadaan ekonomi pulih kembali.

Tindak pidana ekonomi dalam arti luas adalah semua tindak pidana diluar Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi. Hal ini mencakup pelbagai tindak pidana di bidang perekonomian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-undang tentang Korupsi, Undang-undang tentang Perbankan Undang-undang Persaingan Perusahaan, Undang-undang tentang Asuransi, Undang-undang tentang Merek, Undang-undang tentang Paten, Undang-undang tentang Lingkungan Hidup dan lain-lain. Banyak diantara itu undang-undang tersebut bersifat administratif artinya mengatur hal-hal yang bersifat administratif tetapi disertai dengan sanksi pidana. Namun, ada juga undang-undang yang khusus

mengatur tindak pidana tertentu seperti Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Secara khusus, tulisan pendek ini mencoba menjawab pertanyaan sampai sejauh mana tindak pidana ekonomi baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas terakomodir dalam RKUHP dan apa tantangan ke depan jika RKUHP diberlakukan.

B. Perkembangan Peraturan

KUHP mempunyai beberapa pasal yang berkaitan dengan bidang perekonomian seperti delik kecurangan yang tercantum dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 481. Delik-delik tersebut selain mengatur mengenai penipuan secara umum juga mengatur beberapa hal seperti kecurangan di bidang kesusasteraan (Pasal 380), penipuan terhadap asuransi (Pasal 381 KUHP), kecurangan terhadap pembeli (Pasal 383 KUHP), delik ikatan kredit (Pasal 385 KUHP), delik penjualan makanan, minuman dan obat palsu (Pasal 386 KUHP), pemborong melakukan perbuatan curang (Pasal 388 KUHP), memindahkan batas pekarangan (Pasal 389 KUHP), menyiarkan kabar bohong (Pasal 390 KUHP), kecurangan surat utang (Pasal 391 KUHP), kecurangan daftar neraca (Pasal 392 KUHP), memasukkan barang palsu ke Indonesia (Pasal 393 KUHP), dan pengacara memberikan keterangan tidak benar (Pasal 393 KUHP).

Keseluruh delik-delik tersebut dianggap sebagai delik umum karena penempatannya di dalam KUHP yang bersifat umum. Hal ini berarti bahwa delik tersebut walaupun mengatur hal yang khusus namun karena KUHP merupakan kitab umum dan dasar dari hukum pidana, maka berlaku juga seluruh teori dan dasar-dasar yang berlaku di buku I dan hukum acara biasa.

Sementara itu, hukum pidana khusus sering kali diartikan sebagai ketentuan pidana yang mengatur khusus yaitu menyimpang dari ketentuan pidana umum (Akbari, 2014). Aspek penyimpangan tersebut penting dalam pidana khusus karena apabila tidak ada penyimpangan tidaklah dapat disebut hukum pidana khusus. Dalam hukum materiil, pengaturan khusus tersebut dapat berupa tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, perluasan asas teritorial, subyek hukum, atau pidana yang ditentukan berdasarkan kerugian, keuangan dan perekonomian negara. Dalam hukum formil, penyimpangan dapat berupa penyidikan yang dilakukan oleh

lembaga tertentu, didahulukannya pidana tertentu dari perkara pidana lain, adanya pengaturan mengenai gugatan perdata, dan seterusnya.

Tindak pidana ekonomi baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas dianggap merupakan tindak pidana khusus yang berbeda pengaturannya dari KUHP. Perbedaannya terletak pada hukum formil maupun materiilnya sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 Dipandang sebagai tindak pidana khusus, Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1955 mempunyai kekhususan tersendiri baik secara formil maupun materiil yang menyimpang dari hukum pidana dan hukum acara pidana pada umumnya.

Subyek Hukum

Undang-undang Darurat tersebut menyatakan dengan tegas bahwasubyek hukum pidana adalah orang dan badan hukum perseroan,perserikatan, dan yayasan; Semua jenis bentuk usaha tersebut merujukpada 'korporasi'. Hal ini berbeda dengan KUHP yang menyatakan bahwasubyek hukum pidana adalah orang perseorangan.

Klasifikasi kejahatan dan pelanggaran

Tindak pidana ekonomi dalam Undang-undang Darurat tersebut berbedadengan KUHP demikian juga dengan klasifikasi kejahatannya. Undangundang Darurat mensyaratkan bahwa tindak pidana dikategorikan sebagai kejahatan apabila dilakukan dengan sengaja, sedangkan tindak pidana ekonomi yang berupa pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja kecuali jika ditntukan lain. Pembagian tersebut berbeda dengan KUHP yang mendasarkan klasifikasi pelanggaran dan kejahatan atas dasar asal delik hukum atau delik Undang-undang dan berdasarkan ancaman pidananya yang berat atau ringan.

Berlakunya Hukum Pidana

Undang-undang Darurat ini memperluas keberlakuan hukum pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHP. Dalam Undang-undan tersebut hukum Indonesia berlaku terhadap siapapun yang turu melakukan suatu tindak pidana ekonomi yang dilakukan baik di dalam maupun di luar daerah hukum RI.

Percobaan Undang-undang ini mengecualikan KUHP tentang percobaan dimana percobaan melakukan pelanggaran tetap dipidana.

Sanksi pidana

Berbeda dengan KUHP, Undang-undang darurat ini memperbolehkan dilakukannya peradilan in absentia. Hal ini untuk menjamin aset aset yang dikumpulkan karena tindak pidana ekonomi. Lebih lanjut jenis pidananya tidak hanya pidana pokok dan tambahan tetapi juga pidana tata tertib.

Hukum Acara

Undang-undang Darurat memperbolehkan adanya upaya penyelesaian di luar pengadilan dimana hasilnya dapat berupa denda damai.

V. TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Pengantar

Tindak pidana pencucian uang, yang merupakan bagian dari kejahatan terorganisasi, pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan nasional dan internasional. Perhatian dan keprihatinan dunia internasional terhadap kejahatan pencucian uang itu tentunya sangat beralasan karena ruang lingkup dan dimensinya begitu luas sehingga kegiatannya mengandung ciri-ciri sebagai organized crime, white-collar crime, corporate crime, dan transnational crime. Bahkan, dengan kemajuan teknologi informasi, money laundering dapat menjadi salah satu bentuk dari cyber crime.

Sub-Sub Materi:

- Pengertian
- Tahapan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
- Perkembangan Peraturan

Tujuan Pembelajaran

Dengan mempelajari tindak pidana korupsi ini diharapkan mahasiswa dapat memperoleh informasi yang seluas-luasnya mengenai definisi hukum pidana Pencucian Uang, Perkembangan peraturan tindak pidana Pencucian Uang, Tahapan-tahapan Pencucian Uang.

Indikator Hasil Evaluasi Pembelajaran

1. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Definisi hukum pidana khusus dari beberapa ahli hukum pidana.
2. Mahasiswa dapat menjelaskan Pengertian Tindak Pidana Pencucian uang
3. Mahasiswa dapat menjelaskan Tahapan -Tahapan pencucian Uang
4. Mahasiswa dapat menjelaskan Perkembangan Peraturan dalam tindak pidana Pencucian Uang

Metode Dan Strategi Proses Pembelajaran

- Metode Perkuliahan yaitu Problem Based Learning (PBL) pusat pembelajaran ada pada mahasiswa. Metode yang diterapkan adalah “belajar” (Learning) bukan “mengajar” (Teaching).
- Strategi pembelajaran : kombinasi pertemuan tatap muka 50 % (menjelaskan materi kuliah) dan tutorial 50 % (kemampuan mahasiswa berdiskusi dalam menulis tugas-tugas).
- Media instruksional dengan media yang ada dimanfaatkan seperti media papan tulis, computer, LCD.

Materi

A. Pengertian

Istilah Money Laundering dipakai dimana untuk pertama kalinya digunakan oleh

surat kabar dalam memberitakan skandal Watergate yang melibatkan Presiden Nixon di Amerika Serikat pada tahun 1973. Sedangkan sebagai istilah hukum muncul untuk pertama kalinya tahun 1982 dalam perkara US

vs \$4,255,625.3 551 F Supp.314. Sejak itulah istilah ini resmi dipergunakan diseluruh dunia. Istilah ini merujuk kepada pencucian uang oleh mafia, yaitu hasil usaha yang diperoleh secara gelap yang dicampurkan dengan maksud untuk menjadikan seluruh hasil dari tindakan money laundering tersebut diperoleh seolah-olah secara sah.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Sedangkan Pengertian TPPU dalam Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, adalah :

“setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyelamatkan asal usul harta kekayaan”

Asal usul harta kekayaan yang masuk dalam katagori TPPU sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) berjumlah 22 (dua puluh dua) tindak pidana yaitu korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga

kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun atau lebih.

B. Tahapan-tahapan Pencucian Uang

Pada umumnya terdapat 3 (tiga) tahapan dalam pencucian uang, yakni :

a. Placement atau Tahap Penyimpanan

Fase ini memindahkan uang haram dari sumber dimana uang itu diperoleh untuk menghindarkan jejaknya. Atau secara lebih sederhana agar sumber uang haram tidak diketahui oleh pihak penegak hukum. Placement atau penempatan ini dilakukan dengan mendepositokan uang haram tersebut ke dalam system keuangan (financial system). Pada tahap placement tersebut, bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul yang tidak sah dari uang itu. Misal, hasil dari perdagangannarkoba uangnya terdiri atas uang-uang kecil dalam tumpukan besar dan lebih berat dari narkobanya, lalu dikonversi ke dalam denominasi uang yang lebih besar. Lalu didepositokan kedalam rekening bank, dan dibeli ke instrument-instrumen moneter seperti cheques, money orders dan lain-lain. Metode yang paling umum dilakukan dari “placement” ini adalah apa yang disebut sebagai “smurfing”. Melalui “smurfing” ini, maka keharusan untuk melaporkan transaksi uang tunai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikelabui atau dihindari.

b. Layering atau Pelapisan

Layering atau heavy soaping, dalam tahap ini pencuci berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya, dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank lain, hingga beberapa kali. Dengan cara memecah-mecah jumlahnya, dana tersebut dapat disalurkan melalui pembelian dan penjualan investment. Mengirimkan dari perusahaan gadungan yang satu ke perusahaan gadungan yang lain. Para pencuci uang juga melakukan dengan

mendirikan perusahaan fiktif, bisa membeli efek-efek atau alat-alat transportasi seperti pesawat, alat-alat berat dengan atas nama orang lain. Selain itu juga terdapat hubungan antara “placement” dengan “layering” yaitu bahwa setiap prosedur “placement” yang berarti mengubah lokasi fisik atau sifat haram dari uang itu adalah salah satu bentuk “layering”. Strategi “layering” pada umumnya meliputi, mengubah uang tunai menjadi asset fisik, seperti membeli kendaraan bermotor, barang-barang perhiasan dari emas, atau batu-batu permata yang mahal atau “real estate” dll

c. Integration atau Penggabungan

Integration atau menyatukan kembali harta kekayaan hasil kejahatan yang tersebar, biasanya dilakukan pelaku untuk mengaburkan, menyamarkan dan menyembunyikan hasil kejahatan agar tidak terdeteksi dan terlacak aparat penegak hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan dana dengan cara legitimasi ke dalam proses ekonomi yang normal, hal ini dilakukan dengan cara menyampaikan laporan palsu yang menyangkut pinjaman uang, kesemua perbuatan dalam proses pencucian uang haram ini memungkinkan para raja uang haram ini menggunakan dana yang begitu besar, dalam rangka mempertahankan ruang lingkup kejahatan mereka, atau untuk terus berproses dalam dunia kejahatan yang menyangkut terutama narkoba atau para pejabat yang korupsi. Adakalanya dalam upaya melancarkan aksinya pelaku pencucian uang seringkali bersekongkol dengan pihak-pihak lain seperti: pejabat lembaga keuangan, pejabat/pegawai bank, pengacara, akuntan, atau profesional lainnya. Keterlibatan pihak-pihak tersebut tentu saja dapat melancarkan upaya pelaku untuk “memutihkan uangnya”, tanpa terdeteksi aparat penegak hukum. Pihak lain ini umumnya ditugaskan sebagai perantara untuk membuat rekening baik di dalam maupun luar negeri untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal usul harta kekayaan si pelaku.

Ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan Money Laundering terhadap masyarakat sebagai konsekuensi yang ditimbulkan berupa :

- a. Money laundering memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba, para penyelundup dan para penjahat lainnya untuk dapat memperluas kegiatan operasinya. Hal ini akan meningkatkan biaya penegakan hukum untuk

memberantasnya dan biaya perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para korban atau para pecandu narkoba. Memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba, para penyeludup dan para penjahat lainnya untuk dapat memperluas kegiatan operasinya. Hal ini akan meningkatkan biaya penegakan hukum untuk memberantasnya dan biaya perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para pecandu narkoba.

- b. Kegiatan money laundering mempunyai potensi merongrong keuangan masyarakat, hal ini sebagai akibat dari besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Potensi untuk melakukan korupsi meningkat bersama dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar.
- c. Money laundering juga dapat mengurangi pendapatan pemerintah dari sektor pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah.
- d. Mudahnya uang masuk ke negara-negara maju telah menarik unsur yang tidak diinginkan melalui perbatasan, menurunkan tingkat kualitas hidup dan meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan nasional. Sifat money laundering sudah menjadi universal dan bersifat internasional yakni melintasi batasan-batasan yuridis negara. Transaksi dari negara ke negara sekarang sudah sangat mudah, yaitu melalui system internet, pembayaran dilakukan melalui bank secara elektronik. Maka tidak heran jika money laundering sudah biasa disebut sebagai kejahatan transnasional, karena praktik money laundering dapat dilakukan oleh seseorang tanpa harus berpergian keluar negeri.

C. Perkembangan Peraturan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003, menunjukkan adanya beberapa kelemahan (loopholes) dalam undang-undang itu sendiri sehingga menghambat efektifitas penegakan hukum melalui pendekatan anti pencucian uang sebagaimana diuraikan diatas. Kelemahan-kelemahan dimaksud antara lain:

- i. Kriminalisasi perbuatan pencucian uang yang multi interpretatif, banyaknya unsur yang harus dipenuhi atau dibuktikan sehingga menyulitkan dalam hal pembuktian
- ii. Kurang sistematis dan tidak jelasnya klasifikasi perbuatan yang dapat dijatuhi sanksi berikut bentuk-bentuk sanksinya
- iii. Masih terbatasnya pihak pelapor (reporting parties) yang harus menyampaikan laporan kepada PPATK termasuk jenis laporannya
- iv. Tidak adanya landasan hukum mengenai perlunya penerapan prinsip, mengenalipengguna jasa (Customer Due Dilligence) oleh pihak pelapor
- v. Terbatasnya instrumen formal untuk melakukan deteksi dan pentrasiran serta penyitaan aset hasil kejahatan
- vi. Terbatasnya pihak yang berwenang melakukan penyidikan TPPU
- vii. Terbatasnya kewenangan dari PPATK

Kendala legislasi tersebut mengakibatkan tidak maksimalnya pendekatan anti pencucian uang dalam mendukung dan membantu upaya penegakan hukum atas tindak pidana asal (predicate crime) seperti tindak pidana korupsi, penyuapan, narkoba dan psikotropika, tindak pidana ekonomi (perbankan, pasar modal, perasuransian, pajak, kepabeanan, cukai, dsb), serta tindak pidana terorisme.

Hal ini menunjukkan, bahwa pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang belum dapat menjamin kepastian hukum dan ketertiban hukum dalam masyarakat. Kepastian hukum yang konkrit serta penegakan hukum yang berkeadilan dan konsisten sangat diperlukan dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU hadir dengan semangat dan paradigma baru, yaitu mensinergikan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun tujuan dari penyusunan RUU ini adalah:

1. Memperkokoh komitmen bangsa Indonesia untuk menegakkan rezim anti tindak pidana pencucian uang di Indonesia
2. mendukung dan meningkatkan efektivitas upaya penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang

3. memberi dasar hukum yang kuat dan kemudahan dalam pendeteksian, pentrasiran dan penyitaan hasil kejahatan;
4. menyesuaikan pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang dengan standard internasional yang telah mengalami perubahan serta ketentuan anti money laundering strategy yang berlaku secara internasional sebagai international best practice
5. untuk lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat baik dalam maupun luar negeri terhadap penegakan hukum di Indonesia dalam kasus-kasus tindak pidana pencucian uang

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari penyusunan Rancangan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, adalah:

- memelihara dan menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan nasional dari tindak pidana pencucian uang;
- mencegah dan memberantas kejahatan yang melibatkan harta kekayaan dalam jumlah yang signifikan sekaligus mencegah diulangi dan diperluasnya kejahatan tersebut;
- meningkatkan koordinasi penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- meningkatkan penerimaan negara melalui penyitaan dan perampasan hasil kejahatan;
- memenuhi dan mengikuti standar internasional yang telah berubah sebagaimana tercermin dalam “Revised 40+9 FATF Recs” serta ketentuan anti-money laundering regime yang berlaku secara internasional (international best practice).

Indonesia, telah memberikan perhatian yang signifikan untuk memenuhi standar internasional Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Indonesia secara aktif bekerja menuju pembentukan sebuah rezim anti pencucian uang yang efektif. Segala upaya berkenaan dengan legislasi di atas menunjukkan hal yaitu diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) pada tanggal 22 Oktober 2010. Undang-Undang ini mencabut Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003. Dengan pengundangan UU TPPU ini, diharapkan efektifitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang semakin meningkat, terutama karena pengaturannya lebih komprehensif cakupannya lebih luas dan ruang interpretasi lebih dipersempit.

Upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme antara lain dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur melalui regulasi atau kebijakan yang dikeluarkan terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan pelaporan oleh Pihak Pelapor, dan kegiatan lain seperti sosialisasi dan koordinasi. Sedangkan upaya pemberantasan atau penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim dengan melibatkan peran Serta PPATK dan Pihak Pelapor. Sebagai front liner, Pihak Pelapor menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) dan Transaksi Keuangan Tunai (TKT) kepada PPATK untuk dilakukan analisis. Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana Pencucian Uang dan atau tindak pidana lain, laporan hasil analisis (LHA) atau laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disampaikan kepada penyidik tindak pidana asal yang meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Ditjen Pajak, dan Ditjen Bea dan Cukai.

Selain mekanisme yang berawal dari laporan pihak pelapor (dikenal dengan mekanisme bottom up), dikenal pula mekanisme yang berawal dari inisiatif instansi peminta baik di dalam maupun di luar negeri (dikenal dengan mekanisme top down). instansi peminta dapat meminta informasi kepada PPATK berupa informasi dan/atau hasil analisis terkait Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana lainnya.

Bagan berikut ini dapat menggambarkan secara singkat fungsional antar pemangku kepentingan dalam rezim memerangi Pencucian Uang di Indonesia. Pihak-pihak yang terkait dalam rezim anti Pencucian Uang adalah sebagai berikut:

A. Pihak Pelapor Pihak

Pelapor adalah setiap orang yang menurut UU TPPU wajib menyampaikan laporan kepada PPATK (Pasal 1 angka 11), Pihak Pelapor sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b UU TPPU adalah sebagai berikut:

❖ Penyedia jasa keuangan:

- a) bank
- b) perusahaan pembiayaan
- c) perusahaan asuransi dan perusahaan Pialang asuransi
- d) dana pensiun lembaga keuangan
- e) perusahaan efek
- f) manajer investasi
- g) kustodian
- h) wali amanat
- i) perposan sebagai penyedia jasa giro
- j) pedagang valuta asing
- k) penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu
- l) penyelenggara e-money dan/atau e-wallet
- m) koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam
- n) pegadaian
- o) perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditas
- p) penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

❖ penyedia barang dan/atau jasa lain:

- a) perusahaan properti/agen properti
- b) pedagang kendaraan bermotor
- c) pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
- d) pedagang barang seni dan antik; atau
- e) balai lelang.

Pihak Pelapor memiliki peranan penting dalam upaya mencegah dan memberantastindak pidana pencucian uang karena Pihak Pelapor merupakan ujung tombak (front liner) dalam rezim anti pencucian uang. Peran penting Pihak Pelapor

dalam melakukan pencegahan Pencucian Uang melalui penerapan Prinsip Mengenali Pengguna jasa. Dalam prinsip ini, Pihak Pelapor berkewajiban melakukan identifikasi Pengguna Jasa, verifikasi Pengguna & Jasa; dan pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.

Selanjutnya, lebih tegas diatur bahwa Pihak Pelapor berkewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa pada saat melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa; terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah); terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau Pihak Pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.

Dalam bidang pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Pihak Pelapor lebih bersifat membantu penegak hukum pada saat penyidik, penuntut umum dan atau hakim melakukan tindakan yang dibenarkan oleh UU TPPU, seperti penundaan transaksi, penghentian sementara transaksi, pemblokiran, dan permintaan keterangan, secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penghentian sementara (pasal 44 ayat (1) i UU TPPU) :

Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PTPATK dapat meminta penyedia jasa. keuangan untuk menghentikan sementaraseluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana. Jangka waktu penghentian sementara transaksi maksimal 5 hari kerja

2. Penundaan transaksi (Pasal 70 UU TPPU)

Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan penundaan. Transaksi terhadap Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana; PJK berwenang melakukan penundaan transaksi dalam hal pengguna jasa :

- Melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana

- Memiliki rekening untuk menampung harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana
- Diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu Kewajiban Bank dalam penundaan transaksi atas perintah penegak hukum
- Melaksanakan penundaan transaksi sesaat setelah surat perintah/permintaan penundaan transaksi diterima dari penyidik, penuntut umum atau hakim
- Menyerahkan berita acara pelaksanaan penundaan transaksi kepada penyidik, penuntut umum atau hakim yang meminta penundaan transaksi paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan penundaan transaksi
- Penundaan transaksi dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja

3. pemblokiran (Pasal 71 UU TPPU)

Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Prosedur pemblokiran :

- a) Menyebutkan secara jelas mengenai nama dan jabatan penyidik, penuntut umum atau hakim
- b) Identitas orang yang dilaporkan
- c) Menyebutkan alasan pemblokiran, tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan
- d) Menyebutkan tempat harta kekayaan
- e) Pemblokiran dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja

4. permintaan keterangan (Pasal 72 UU TPPU)

Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan. Dalam hal ini tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lain. Permintaan keterangan harus disertai dengan laporan polisi dan surat perintah penyidikan, surat penunjukan penuntut umum atau surat penetapan majelis hakim. Modus operandi Pencucian uang dapat dilakukan dengan cara :

- Pengiriman uang tunai

- Menukar dengan mata uang asing
- Pengiriman uang dengan dipecah-pecah
- Dibelanjakan barang berharga
- Transfer dengan elektronik
- Sistem pengiriman Alternatif dan bank Gelap
- Digunakan untuk perdaganganMembuat suatu perusahaan
- Kegiatan perjudian
- Pembelian saham
- Menggunakan perusahaan palsu
- Menggunakan nama lain
- Menggunakan rekening di bank asing
- Menggunakan identitas palsu

B. Lembaga Pengawas dan Pengatur

Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU TPPU. Sebelum disahkannya UU TPPU, istilah yang digunakan bagi Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah “regulator”.

Pihak-pihak yang menjadi Lembaga Pengawas dan Pengatur terhadap Penyedia Jasa Keuangan adalah :

❖ Bank Indonesia

Salah satu tugas Bank Indonesia berdasarkan Pasal 8 huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank; Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 adalah dan mengawasi Bank. Selain itu, sesuai Pasal 29 Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 dan Pasal 50 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, diatur bahwa Pembinaan dan pengawasan Bank, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dilakukan oleh Bank Indonesia.

Dengan demikian, sesuai UU TPPU, Bank Indonesia; Lembaga Pengawas dan Pengatur yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau

pengenaansanksi terhadap Pihak Pelapor yang berbentuk bank. Di samping itu, Bank Indonesia juga sebagai lembaga pengawas dan pengatur bagi Pedagang Valuta Asing, dan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU). Terkait dengan pelaksanaan Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan pendanaan Terorisme Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/PBI/2007 tentang Pedagang Valuta Asing, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/28/PBI/2006 tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/49/DASP tentang Perizinan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang Perorangan dan Badan Usaha Selain Bank).

- Peraturan Bank Indonesia No. 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, menggantikan Peraturan Bank Indonesia No. 631/PBI/2004 tanggal 28 Desember 2004.
- Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Uang Elektronik (Electric Money).

❖ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) dan Kementerian Keuangan

- a) Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Bapepam-LK. Dengan demikian, Bapepam-LK berkedudukan sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur sesuai dengan UU TPPU. Dalam kaitan ini, Bapepam-LK telah mengeluarkan ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) pada industri Pasar Modal melalui Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.10,

Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No : Kep-476/BL/2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal. Penyedia jasa keuangan di bidang pasar modal antara lain adalah Perusahaan Efek, Manajer Investasi, Kustodian, dan Wali Amanat.

- b) Bagi Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB), lembaga pengawas dan pengaturnya adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

Untuk lembaga keuangan non bank, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank. Lembaga Keuangan Non Bank antara lain adalah Perasuransian, Dana Pensiun, dan Lembaga Pembiayaan

- c) Demikian juga untuk pembina dan pengawas pegadaian, sesuai Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian, lembaga pengawas dan pengaturnya adalah Menteri Keuangan, yang selanjutnya dilaksanakan oleh, Bapepam-LK atas nama Menteri.

❖ Kementerian Komunikasi dan Informatika (KEMKOMINFO)

KEMKOMINFO merupakan regulator bagi penyedia jasa keuangan di bidang perposan penyedia jasa giro. Peraturan perundang-undangan di bidang perposan yang berlaku saat ini mengacu kepada undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 dan peraturan pelaksanaannya. Salah satu fungsi Ditjen Postel dalam struktur kelembagaan KEMKOMINFO adalah di bidang penyelenggaraan pos dan telekomunikasi nasional yaitu: pengaturan, pengawasan dan pengendalian. Fungsi pengaturan meliputi kegiatan yang bersifat umum dan teknis operasional yang antara lain diimplementasikan dalam bentuk pengaturan perizinan dan persyaratan dalam penyelenggaraan pos dan telekomunikasi. Fungsi pengawasan merupakan suatu fungsi dari Ditjen Postel untuk memantau dan mengawasi seluruh kegiatan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi agar tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Ditjen Postel adalah Lembaga Pengawas dan Pengatur bagi kegiatan usaha penyelenggaraan pos sebagaimana diatur dalam UU TPPU.

UU TPPU memberikan kewajiban kepada penyelenggara pos yang memberikan jasa layanan Transaksi keuangan kepada Pengguna Jasa. Untuk mengefektifkan pengawasan terhadap penyelenggara pos, PPATK dan KEMKOMINFO khususnya Direktorat Jenderal Pos, telah melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) atau Nota Kesepahaman pada tanggal 12 Juni 2009.

❖ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI),
Kementerian

Perdagangan BAPPEBTI atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun.1997, BAPPEBTI merupakan salah satu unit eselon berada di bawah Kementerian Perdagangan. BAPPEBTI mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka serta pasar fisik dan jasa. Dengan demikian, BAPPEBTI merupakan regulator bagi perdagangan berjangka komoditi. Untuk mengefektifkan pengawasan terhadap perdagangan berjangka komoditi, PPATK dan BAPPEBTI, telah melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) atau Nota Kesepahaman pada tanggal 8 November 2008;

❖ Kementerian Koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah)

Lembaga Pengawas dan Pengatur koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam berdasarkan UU No.25 Tahun 1992 adalah Kementerian Koperasi dan UKM. Lembaga Pengawas dan Pengatur Penyedia Barang dan/atau Jasa lain adalah:

- a. Dirjen Piutang dan Lelang Negara, Kementerian Keuangan Pengaturan Balai Lelang dapat ditemukan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2005 Tentang Balai Lelang. Dalam peraturan ini, Balai Lelan merupakan Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan oleh swasta nasional, patungan swasta nasional dengan swasta asing, atau patungan BUMN/D dengan swasta nasional/asing yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha Balai Lelang. Izin Operasional Balai Lelang diberikan dan dicabut oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan
- b. Perusahaan/agen properti

Ketentuan yang mengatur mengenai perusahaan/agen properti adalah Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 33/M-DAG/PER/8/2008 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN), bertugas dan bertanggung jawab di bidang perdagangan dalam negeri. Departemen Perdagangan melakukan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha perantara perdagangan property. Pembinaan sebagaimana dilakukan melalui penyuluhan, konsultasi, fasilitasi, pendidikan, dan pelatihan. Pengawasan dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan.

c. PPATK

Berasarkan Pasal 31, Pengawasan Kepatuhan atas kewajiban pelaporan bagi Pihak Pelapor dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur dan/atau PPATK. Dalam hal Pengawasan Kepatuhan atas kewajiban pelaporan tidak dilakukan atau belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur, Pengawasan Kepatuhan atas kewajiban pelaporan dilakukan oleh PPATK. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 18 UU TPPU, antara lain diatur bahwa Lembaga Pengawas dan Pengatur menetapkan ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa. Dalam hal belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur, ketentuan mengenai prinsip mengenali Pengguna Jasa dan pengawasannya diatur dengan Peraturan Kepala PPATK. Khusus berkenaan dengan ketentuan pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lainnya yang keluar atau masuk wilayah pabean RI menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, merupakan salah satu Unit di bawah Kementerian Keuangan yang juga bagian dari rezim anti pencucian uang terkait dengan pelaporan Cross Border Cash Carrying (CBCC). Pengaturan lebih lanjut mengenai

Pelaporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT/ CBCC) diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Bea Cukai Nomor 1 Tahun 2005.

- ❖ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai Financial Intelligence Unit (FIU)

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disebut PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang (Pasal 1 angka 2 UU TPPU). PPATK merupakan suatu financial Intelligence Unit (FIU) yang memiliki bentuk administrative model. Dalam hal ini banyak berperan sebagai perantara antara masyarakat atau industri jasa keuangan dengan institusi penegak hukum. Tugas utamanya sesuai dengan Pasal 39 UU TPPU adalah mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang. Dalam melaksanakan fungsinya, sesuai dengan Pasal 40 UU TPPU, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.

Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK berwenang :

- a) meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu. Penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta kepada PPATK dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan
- b) menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan
- c) mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait
- d) memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang
- e) mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang
- f) menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang

- g) menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang. Tindak Pidana Pencucian Uang
- 2. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi, PPATK berwenang menyelenggarakan sistem informasi.
- 3. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor
 Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor, PPATK berwenang :
 - a) menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi Pihak Pelapor
 - b) menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang;
 - c) melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;
 - d) menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;
 - e) memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan;
 - f) merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha pihak pelapor
 - g) menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur.
- 4. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain. Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi) PPATK dapat :
 - a) meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;
 - b) meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
 - c) meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK;
 - d) meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;

- e) meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri;
- f) menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang;
- g) meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang;
- h) merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i) meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;
- j) meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang;
- k) mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- l) meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik

Dalam melaksanakan kewenangannya, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan koda etik yang mengatur kerahasiaan.

❖ Lembaga Penegak Hukum

Untuk lebih meningkatkan efektifitas dan keberhasilan penegakan hukum TPPU, maka ketentuan yang mengatur mengenai hukum acara TPPU atau pemeriksaan dalam setiap tingkatan perlu lebih diperjelas dan diperkuat. Kedudukan dan hubungan antara UU TPPU dengan peraturan perundang-undangan terkait lainnya harus jelas dan harmonis.

Dengan demikian, setiap tindakan pemeriksaan TPPU memiliki landasan hukum yang kuat. Prosedur atau mekanisme untuk melakukan misalnya penundaan

transaksi perlu diatur secara lebih jelas dan lengkap agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbedabeda sehingga timbul keragu-raguan dari para aparat penegakan hukum dalam mengambil tindakan.

VI. TINDAK PIDANA KESEHATAN

Pengantar

Hukum kesehatan pada saat ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu Hukum kesehatan public (public health law) dan Hukum Kedokteran (medical law). Hukum kesehatan public lebih menitikberatkan pada pelayanan kesehatan masyarakat atau mencakup pelayanan kesehatan rumah sakit, sedangkan untuk hukum kedokteran, lebih memilih atau mengatur tentang pelayanan kesehatan pada individual atau seorang saja, akan tetapi semua menyangkut tentang pelayanan kesehatan.

Sub-Sub Materi:

- Pengertian
- Perkembangan Peraturan
- Ketentuan Hukum Upaya Kesehatan

Tujuan Pembelajaran

Dengan mempelajari tindak pidana korupsi ini diharapkan mahasiswa dapat memperoleh informasi yang seluas-luasnya mengenai definisi hukum pidana Kesehatan, Perkembangan peraturan tindak pidana Kesehatan, dan Ketentuan Hukum Upaya Kesehatan

Indikator Hasil Evaluasi Pembelajaran

1. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Definisi hukum pidana khusus dari beberapa ahli hukum pidana.
2. Mahasiswa dapat menjelaskan Pengertian Tindak Pidana Kesehatan

3. Mahasiswa dapat menjelaskan Perkembangan Peraturan dalam tindak pidana Kesehatan
4. Mahasiswa dapat menjelaskan Ketentuan Hukum Upaya Kesehatan

Metode Dan Strategi Proses Pembelajaran

- Metode Perkuliahan yaitu Problem Based Learning (PBL) pusat pembelajaran ada pada mahasiswa. Metode yang diterapkan adalah “belajar” (Learning) bukan “mengajar” (Teaching).
- Strategi pembelajaran : kombinasi pertemuan tatap muka 50 % (menjelaskan materi kuliah) dan tutorial 50 % (kemampuan mahasiswa berdiskusi dalam menulis tugas-tugas).
- Media instruksional dengan media yang ada dimanfaatkan seperti media papan tulis, computer, LCD.

Materi

A. Pengertian

Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya. Oleh sebab itu, hukum kesehatan mengatur dua kepentingan yang berbeda, yakni:

- Penerima pelayanan, yang harus diatur hak dan kewajiban, baik perorangan, kelompok atau masyarakat.
- Penyelenggara pelayanan: organisasi dan sarana-prasarana pelayanan, yang juga harus diatur hak dan kewajibannya.

Mengingat banyaknya penyelenggara pelayanan kesehatan, baik dari segi perorangan maupun kolektivitas, di mana masing-masing mempunyai kekhususan antara pihak yang dilayani kesehatannya maupun sifat pelayanan dari pihak

penyelenggara pelayanan kesehatan, maka hukum kesehatan itu dikelompokkan menjadi berbagai bidang, antara lain:

1. Hukum Kedokteran dan Kedokteran Gigi.
2. Hukum Keperawatan.
3. Hukum Farmasi Klinik.
4. Hukum Rumah Sakit.
5. Hukum Kesehatan Masyarakat.
6. Hukum Kesehatan Lingkungan.
7. Hukum Rumah Sakit.

Adanya hukum dan Etika di bidang kesehatan, maka terdapat pula berbagai badan yang melaksanakan pengawasan, mengontrol dan memberi sanksi. Badan-badan peradilan tersebut antara lain :

1. Peradilan Pidana – Perdata
2. Peradilan Agama, Militer
3. Peradilan Administrasi / Tata Usaha Negara
4. Peradilan Hak Asasi Manusia
5. Peradilan Profesi Kesehatan
6. Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan
7. Badan Perlindungan Kesehatan Nasional
8. Majelis Pembinaan Pengawasan Etika Kesehatan Medis
9. Majelis Etika Profesi dan Rumah Sakit

Sejalan dengan perkembangan peradaban di dunia, ilmu dan teknologikedokteran juga telah berkembang pesat. Persoalan kesehatan bukan lagi hanyamenjadi persoalan antara dokter dan pasiennya, telah banyak pelaku-pelaku lainyang ikut berperan dalam dunia kesehatan, seperti asuransi kesehatan, industrialat medis dan farmasi serta masih banyak lagi yang lainnya.

Dengan semakin meluasnya imu kesehatan, termasuk juga dokter atautenaga kesehatan lainnya juga juga telah terspesialisasi, maka pada sisi laindokter atau tenaga kesehatan atau nama lainnya tidak boleh lagi diisolasi darihukum, karena seluruh masyarakat harus memiliki kedudukan yang setara dihadapan hukum. Dengan adanya berbagai perkembangan tersebut, maka pada

sekitar tahun 1960-an di negara-negara eropa dan amerika mulai berkembang bidang hukum baru yakni: hukum kesehatan.

Hukum kesehatan adalah kaidah atau peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban tenaga kesehatan, individu dan masyarakat dalam pelaksanaan upaya kesehatan, aspek organisasi kesehatan dan aspek sarana kesehatan. Selain itu, hukum kesehatan dapat juga dapat didefinisikan sebagai segala ketentuan atau peraturan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan dan pelayanan kesehatan.

Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa :

“Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan amanah konstitusi dan cita-cita bangsa Indonesia. Oleh karenanya, untuk setiap kegiatan dan atau upaya yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatanmasyarakat yang setinggi-tingginya harus dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan daya saing bangsa serta pembangunan nasional Indonesia.

Hukum kesehatan berperan untuk mengusahakan adanya keseimbangan tatanan di dalam upaya pelaksanaan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat serta memberikan jaminan kepastian hukumsesuai dengan hukum kesehatan yang berlaku.

Hukum kesehatan memiliki cakupan yang lebih luas daripada hukum medis (medical law). Hukum kesehatan meliputi, hukum medis (medical law) hukum keperawatan (nurse law), hukum rumah sakit (hospital law), hukum pencemaran lingkungan (environmental law) dan berbagai macam peraturan lainnya yang berkaitan dengan kesehatan manusia. Hukum kesehatan tidak dimuat dalam satu kitab khusus seperti halnya kitab Undang-Undang HukumPerdata atau Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Hukum kesehatan dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kesehatan manusia atau peraturan perundang-undangan lainnya yang memuat pasal atau ketentuan mengenai kesehatan manusia. Ketentuan mengenai hukum kesehatan tersebut penerapannya dan penafsirannya serta penilaian terhadap faktanya merupakan bidang medis. Itulah sebabnya hukum kesehatan merupakan salah bidang ilmu yang cukup sulit untuk ditekuni karena harus terkait dengan 2 (dua) disiplin ilmu sekaligus.

B. Perkembangan Peraturan

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Regulasi bidang hukum kesehatan seperti yang saat ini menjadi rujukan dalam menyelenggarakan sesuatu berkaitan dengan masalah kesehatan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU No. 36 Tahun 2009). Terdapat beberapa istilah yang penting untuk mengetahui penyelenggaraan kesehatan di Indonesia, yaitu:

- Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
- Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
- Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
- Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.
- Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

- Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
- Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
- Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
- Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
- Teknologi kesehatan adalah segala bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.
- Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
- Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
- Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.

- Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
- Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
- Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Terkait dengan penyelenggaraan kesehatan, beberapa hal penting diatur dalam UU Kesehatan adalah mengenai upaya kesehatan, tenaga kesehatan, sarana kesehatan, obat dan alat kesehatan.

1. Upaya Kesehatan

Pengertian secara umum mengenai upaya kesehatan yang diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Sedangkan mengenai Penyelenggaraan Upaya Kesehatan UU No. 36 Tahun 2009 mengaturnya sebagai berikut:

- a. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat.

- b. Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Dalam upaya kesehatan, terkait dengan implementasinya adalah mengenai penyelenggaraannya. Kegiatan-kegiatan penyelenggaraan upaya kesehatan dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- pelayanan kesehatan;
 - pelayanan kesehatan tradisional;
 - peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit;
 - penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
 - kesehatan reproduksi;
 - keluarga berencana;
 - kesehatan sekolah;
 - kesehatan olahraga;
 - pelayanan kesehatan pada bencana;
 - pelayanan darah;
 - kesehatan gigi dan mulut;
 - penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran;
 - kesehatan matra;
 - pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
 - pengamanan makanan dan minuman;
 - pengamanan zat adiktif; dan/atau
 - bedah mayat.
- keluarga berencana;
- kesehatan sekolah;
- kesehatan olahraga;
- pelayanan kesehatan pada bencana;
- pelayanan darah;
- kesehatan gigi dan mulut;
- penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran;
- kesehatan matra;

pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
pengamanan makanan dan minuman;
pengamanan zat adiktif; dan/atau
bedah mayat.

Penyelenggaraan upaya kesehatan tersebut secara keseluruhan dilaksanakan oleh sumber daya kesehatan³¹. Dan, demi terselenggaranya maksud dari penyelenggaraan kesehatan, maka pemerintah dan masyarakat juga memiliki tanggung jawab yang tidak kecil. Oleh karena itu peran pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk terselenggaranya upaya kesehatan. Ketentuan UU Kesehatan No.36 Tahun 2009 mengatur peran pemerintah dan masyarakat sebagai berikut :

Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan upaya kesehatan. Dan, Penyelenggaraan upaya kesehatan harus memperhatikan fungsi sosial, nilai, dan norma agama, sosial budaya, moral, dan etika profesi.

Demikian pula halnya dengan pengembangan upaya kesehatan, peningkatan upaya kesehatan menjadi tanggung jawab pemerintah. Ketentuan UU Kesehatan No.36 Tahun 2009 yang mengatur peningkatan upaya kesehatan adalah:

- a. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab meningkatkan dan mengembangkan upaya kesehatan.
- b. Upaya kesehatan sekurang-kurangnya memenuhi kebutuhan kesehatan dasar masyarakat.
- c. Peningkatan dan pengembangan upaya kesehatan dilakukan berdasarkan pengkajian dan penelitian.
- d. Ketentuan mengenai peningkatan dan pengembangan sebagaimana dilaksanakan melalui kerja sama antar-Pemerintah dan antarlintas sektor.

Tujuan dari upaya kesehatan tersebut pada dasarnya ditujukan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat, yaitu :

- Upaya kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi individu atau masyarakat.

- Upaya kesehatan sebagaimana didasarkan pada standar pelayanan minimal kesehatan
- Ketentuan mengenai standar pelayanan minimal kesehatan akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Pengaturan berkaitan dengan tenaga kesehatan

Tenaga kesehatan juga merupakan salah satu faktor yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan penyelenggaraan kesehatan. Tanpa adanya tenaga kesehatan, mustahil penyelenggaraan kesehatan akan terlaksana. Dalam UU Kesehatan No.36 Tahun 2009 dimaksud sebagai tenaga kesehatan adalah :

“setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan"

Keseluruhan terkait dengan tenaga kesehatan baik dari proses rekrutmen hingga penempatan dan pelaksanaan pekerjaannya hingga pertanggungjawaban atas pekerjaannya secara keseluruhan diatur oleh pemerintah. UU Kesehatan No.36 Tahun 2009 mengatur tentang hal tersebut, yaitu :

- a. Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- b. Ketentuan mengenai perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Untuk lebih memberikan jaminan dan kepastian hukum baik mengenai hak dan tanggung jawab tenaga kesehatan maupun pertanggungjawabannya kepada masyarakat, maka tenaga kesehatan akan diatur tersendiri dengan Undang-Undang.

Beberapa Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur tentang persyaratan dan tanggung jawab tenaga kesehatan adalah :

Pasal 22

- (1) Tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum.

- (2) Ketentuan mengenai kualifikasi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 23

- (1) Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
- (2) Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.
- (3) Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah.
- (4) Selama memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengutamakan kepentingan yang bernilai materi.
- (5) Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 24

- (1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
- (2) Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh organisasi profesi. (3) Ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 25

- (3) Pengadaan dan peningkatan mutu tenaga kesehatan diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat melalui pendidikan dan/atau pelatihan
- (4) Penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 26

- (1) Pemerintah mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan pelayanan kesehatan.
- (2) Pemerintah daerah dapat mengadakan dan mendayagunakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerahnya.
- (3) Pengadaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat;
 - b. jumlah sarana pelayanan kesehatan; dan
 - c. jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan beban kerja pelayanan kesehatan yang ada.
- (4) Penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan hak tenaga kesehatan dan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang merata.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan tenaga kesehatan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 27

- (1) Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.
- (2) Tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.
- (3) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 28

- (1) Untuk kepentingan hukum, tenaga kesehatan wajib melakukan pemeriksaan kesehatan atas permintaan penegak hukum dengan biaya ditanggung oleh negara.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kompetensi dan kewenangan sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki.

Pasal 29

Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.

Pasal 34

- (1) Setiap pimpinan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan perseorangan harus memiliki kompetensi manajemen kesehatan perseorangan yang dibutuhkan.
- (2) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang mempekerjakan tenaga kesehatan yang tidak memiliki kualifikasi dan izin melakukan pekerjaan profesi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
- (2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 63

Pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu (Pasal 63 ayat (4)).

Pasal 65

Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. (Pasal 65 ayat (1))

Pasal 67

Pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. (Pasal 67 ayat (1))

Pasal 68

Pemasangan implan obat dan/atau alat kesehatan ke dalam tubuh manusia hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu (Pasal 68 ayat (1)).

Pasal 69

Bedah plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. (Pasal 69 ayat (1)).

Pasal 88

- (1) Pelayanan transfusi darah meliputi perencanaan, pengerahan pendonor darah, penyediaan, pendistribusian darah, dan tindakan medispemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
- (2) Pelaksanaan pelayanan transfusi darah dilakukan dengan menjaga keselamatan dan kesehatan penerima darah dan tenaga kesehatan dari penularan penyakit melalui transfusi darah.

Pasal 121

- (1) Bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis hanya dapat dilakukan oleh dokter sesuai dengan keahlian dan kewenangannya.
- (2) Dalam hal pada saat melakukan bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis ditemukan adanya dugaan tindak pidana, tenaga kesehatan wajib melaporkan kepada penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 124

Tindakan bedah mayat oleh tenaga kesehatan harus dilakukan sesuai dengan norma agama, norma kesusilaan, dan etika profesi.

Pasal 127

- (1) Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:
 - a. hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal;

- b. dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu; dan
- c. pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

Pasal 147

- (1) Upaya penyembuhan penderita gangguan kesehatan jiwa merupakan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Upaya penyembuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang dan di tempat yang tepat dengan tetap menghormati hak asasi penderita.
- (3) Untuk merawat penderita gangguan kesehatan jiwa, digunakan fasilitas pelayanan kesehatan khusus yang memenuhi syarat dan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 157

- (1) Pencegahan penularan penyakit menular wajib dilakukan oleh masyarakat termasuk penderita penyakit menular melalui perilaku hidup bersih dan sehat.
- (2) Dalam pelaksanaan penanggulangan penyakit menular, tenaga kesehatan yang berwenang dapat memeriksa tempat-tempat yang dicurigai berkembangnya vektor dan sumber penyakit lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 190

- (4) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama

10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Undang-Undang RI No. 36 th 2009 tentang Kesehatan dibentuk berdasarkan 5 (lima) pertimbangan, yaitu:

Pertama, kesehatan adalah hak asasi dan salah satu unsur kesejahteraan. *Kedua*, prinsip kegiatan kesehatan yang nondiskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan. *Ketiga*, kesehatan adalah investasi. *Keempat*, pembangunan kesehatan adalah tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, dan yang *Kelima* adalah bahwa Undang-undang No. 23 Tahun 1992 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat⁴⁰.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan. Selain itu kesehatan juga merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan adanya pokok pikiran tersebut maka dirasa perlu melakukan perubahan paradigma upaya pembangunan kesehatan, oleh karena itu sudah saatnya kita melihat persoalan kesehatan sebagai suatu faktor utamadan investasi berharga yang pelaksanaannya didasarkan pada sebuah paradigma baru yang biasa dikenal dengan paradigma sehat, yakni paradigma kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif.

Menurut Leenen secara khusus perangkat hukum kesehatan harus bisa menguraikan secara rinci tentang segala hak dasar manusia yang merupakan dasar

bagi hukum kesehatan. Dalam rangka implementasi paradigma sehat tersebut, dibutuhkan sebuah undang-undang yang berwawasan sehat, bukan undang-undang yang berwawasan sakit. Pada sisi lain, perkembangan ketatanegaraan bergeser dari sentralisasi menuju desentralisasi yang ditandai dengan diberlakukannya

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian karena undang-undang kesehatan terbaru ini dianggap mampu menjawab kompleksitas pembangunan kesehatan yang tidak terdapat (tertampung lagi) dalam undang-undang kesehatan yang lama, maka undang-undang tersebut memuat ketentuan yang menyatakan bahwa bidang kesehatan sepenuhnya diserahkan kepada daerah masing-masing yang setiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan menyelenggarakan seluruh aspek kesehatan. Tentunya hal ini merupakan suatu konsep baru dimana pengelolaan kesehatan yang semula bersifat sentralistik saat ini menjadi otonom.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang mengatur tentang pembagian urusan antara Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan perlu disesuaikan dengan semangat otonomi daerah. Oleh karena itu, perlu dibentuk kebijakan umum kesehatan yang dapat dilaksanakan oleh semua pihak dan sekaligus dapat menjawab tantangan era globalisasi dan dengan semakin kompleksnya permasalahan kesehatan dalam suatu Undang-Undang Kesehatan yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Undang-undang kesehatan terbaru ini dalam perkembangan memungkinkan masih menimbulkan konsep pemahaman yang perlu dijabarkan lagi atau diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri kesehatan, atau telah dijabarkan sebagaimana dicantumkan dalam “Pasal 203 pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Undang-Undang

Kesehatan yang lama telah berganti dengan Undang-Undang Kesehatan yang baru. Sebagaimana ditunjukkan Pasal 204. Pada saat undang-undang ini berlaku, tanggal 30 Oktober 2009 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan yang terdiri dari 22 bab dan 205 pasal ini terbagi dalam sistematika berikut : Bab I Ketentuan Umum, Bab II Maksud dan Tujuan, Bab III Hak dan Kewajiban, Bab IV Tanggung Jawab Pemerintah, Bab V Sumber daya Bidang Kesehatan yang meliputi tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan, Bab VI Upaya Kesehatan yang meliputi : Upaya pelayanan kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat, Pelayanan kesehatan; Perbekalan kesehatan, teknologi dan produk teknologi, Pelayanan kesehatan tradisional, Peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit; Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan; Kesehatan reproduksi; Keluarga berencana; Kesehatan sekolah; Kesehatan olahraga; Pelayanan kesehatan pada bencana; Pelayanan darah; Kesehatan gigi dan mulut; Penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran; Kesehatan matra; Pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan; Pengamanan makanan dan minuman; Pengamanan zat adiktif; dan/atau Bedah mayat. Bab VII Kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, Lanjut Usia dan Penyandang Cacat, Bab VIII Gizi, Bab IX Kesehatan Jiwa Bab, X Penyakit Menular dan tidak menular, Bab XI Kesehatan lingkungan yang meliputi : Tentang lingkungan yang berwawasan kesehatan (lingkungan sehat) meliputi Limbah cair; Limbah padat; Limbah gas; Sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pemerintah; Binatang pembawa penyakit; Zat kimia yang berbahaya; Kebisingan yang melebihi ambang batas; Radiasi sinar pengion dan non pengion; Air yang tercemar; Udara yang tercemar; dan Makanan yang terkontaminasi. Bab XII Kesehatan Kerja, Bab XIII Pengelolaan Kesehatan. Pengelolaan administrasi kesehatan, Informasi kesehatan, Sumber daya kesehatan, Upaya kesehatan, Pembiayaan kesehatan, Peran serta dan pemberdayaan

masyarakat, Ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, serta pengaturan hukum kesehatan, Bab XIV Informasi Kesehatan,

Bab XV Pembiayaan Kesehatan Pembiayaan kesehatan 5 % APBN, 10 % APBD dimana 2/3 untuk kegiatan preventif dan promotif, Bab XVI Peran serta Masyarakat Peran serta masyarakat tetapi masih tersirat masyarakat Masih sebagai objek dalam pembangunan kesehatan, Bab XVII Badan Pertimbangan Kesehatan, Bab XVIII Pembinaan dan Pengawasan, Bab XIX Penyidikan, Bab XX Ketentuan Pidana yang meliputi : Ketentuan pidana penjara dan denda bagi pelanggaran pelaksanaan sumber daya kesehatan dan upaya kesehatan. Bab XXI Ketentuan peralihan, dan Bab XXII Penutup

Bila dibandingkan dengan undang-undang kesehatan terdahulu, maka dapat terlihat sistematika dari Undang Undang Nomor 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan yaitu : Bab I Ketentuan Umum, Bab II Asas dan Tujuan, Bab III Hak dan Kewajiban Hak, Bab IV Tanggung Jawab Pemerintah, Bab V Upaya Kesehatan, Bab VI Sumber Daya Kesehatan Sumber, Bab VII Peran Serta Masyarakat Masyarakat, Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan, Bab IX Penyidikan, Bab X Ketentuan Pidana, Bab XI Ketentuan Peralihan dan Bab XII Ketentuan Penutup.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Landasan Hukum Kesehatan terlihat dari Undang-undang Kesehatan baru ini, secara konseptual telah mencerminkan adanya asas hukum kesehatan bertumpu pada hak atas pemeliharaan kesehatan sebagai hak dasar social (the right to health care) yang ditopang oleh 2 (dua) hak dasar individual yang terdiri dari hak atas informasi (the right to information) dan hak untuk menentukan nasib sendiri (the right of self determination). Sejalan dengan hal tersebut undang undang kesehatan baru juga

telah mentautkan bahwa hukum kesehatan dengan hak untuk sehat dengan menyatakan bahwa hak atas pemeliharaan kesehatan mencakup berbagai aspek yang merefleksikan pemberian perlindungan dan pemberian fasilitas dalam pelaksanaannya. Untuk merealisasikan hak atas pemeliharaan bisa juga mengandung pelaksanaan hak untuk hidup, hak atas privasi, dan hak untuk memperoleh informasi.

Bila diamati secara detail terdapat beberapa perbedaan antara undang-undang kesehatan yang baru dengan yang lama. Terlepas dari pro kontra, hal ini merupakan sebuah langkah maju bagi dunia kesehatan di tanah air. Sebut saja misalnya ketentuan mengenai larangan merokok telah lama di perjuangkan oleh pakar dan praktisi kesehatan termasuk pada saat pembahasan RUU kesehatan tahun 1992. Namun karena kuatnya arus dandominasi kalangan yang berkepentingan (pengusaha rokok) hal itu mentah dalam pembahasan di DPR. Kita cermati kembali mengenai ASI eksklusif, selama ini upaya untuk memperkuat program ASI eksklusif masih sebatas upaya persuasif dengan pendekatan promosi yang kalah gaung dari produsen susu formula. Saat ini ketentuan tentang ASI eksklusif tersebut telah⁵⁷ diakomodasi lengkap dengan ketentuan pidana yang mengikat. Kondisi ini tentunya juga merupakan cerminan dari upaya politik yang dilakukan oleh pemerintah yang mendapat masukan secara terus menerus dari kalangan pegiat dan praktisi kesehatan. Undang-undang kesehatan No. 32 Tahun 2009 ini merupakan revisi dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Mengutip pernyataan ketua Pansus UU kesehatan dr.Ribka Tjiptaning menyatakan bahwa Undang Undang kesehatan yang lama sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, otonomi daerah dan masyarakat saat ini, sehingga perlu perubahan untuk memberikan jaminan kesehatan kepada rakyat miskin. Namun hal yang perlu diperhatikan kembali dari undang-undang Kesehatan yang baru tersebut mengatur sejumlah poin penting atau cukup berbeda dari UU yang lama yakni UU kesehatan nomor 23 tahun 1992. Adapun beberapa poin penting itu adalah: Pertama, sumber pembiayaan kesehatan berasal dari pemerintah pusat, pemda, masyarakat, dan swasta yang besarnya 5% APBN, sementara untuk daerah besarnya 10 % dari APBD. Kedua, ketentuan aborsi diatur lebih jelas. Undang-undang

Kesehatan ini langsung menyebutkan istilah ‘aborsi’, tidak lagi ‘tindakan medis’. Sementara ketentuan pengecualian dari tindakan aborsi ini mencakup keadaan /keawatdaruratan medis bagi ibu/janin, korban perkosaan dengan bantuan konsellor yang berkompeten.Usia kehamilan yang boleh dilakukan aborsi dibatasi hanya sampai umur kehamilan dibawah 6 minggu kecuali kedaruratan medis. Ketiga, Undang-undang Kesehatan menegaskan hak bayi untuk memperoleh ASI eksklusif selama 6 bulan, kecuali dalam keadaan darurat medis, ASI dapat digabung dengan makanan lain dan susu formula.Ketentuan pidana yang terkait hal ini jika setiap orang dengan sengaja menghalangi program pemberian ASI eksklusif diancam hukuman pidana maksimal 1 tahun dan denda 100 juta rupiah. Keempat, Undangundang Kesehatan juga memperjelas definisi zat adiktif yang masih rancu dalam UU Kesehatan sebelumnya, termasuk yang paling hangat dibicarakan tentang hilangnya ayat 2 pasal 113 yang menyebutkan tembakau sebagai salah satu zat adiktif. Larangan merokok di tempat umum juga disebutkan secara jelas yakni di tempat pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat bekerja dan tempat umum yang ditetapkan. Ancaman pidananya pun cukup fantastik yaitu denda 50 Juta rupiah. Kelima, mengenai harga obat. Undang-undang ini memberikan kewenangan pada pemerintah untuk mengendalikan harga obat esensi dan obat generik agar harganya dapat terjangkau. Ketentuan lain yang cukup fenomenal adalah tentang jaminan kesehatan kepada masyarakat. Pemerintah dan rumah sakit tidak bisa lagi melepaskan diri dari kewajibannya memenuhi jaminan kesehatan. Rumah sakit tidak bisa lagi menolak pasien yang tidak bisa membayar uang muka dan tidak mampu membayar, khususnya pasien dalam keadaan darurat. Bagi Rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan yang membandel akan dikenani sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda 200 juta rupiah. Sedangkan jika tindakan tersebut mengakibatkan si pasien meninggal dunia/cacat tetap di kenai sanksi pidana 10 tahun dan denda 1 milyar rupiah.

Bila diperhatikan isi ketentuan yang ada dalam Undang-undang Kesehatan yang baru, penanganan terdapat 4 (empat) sifat, yaitu: 1. Perintah (gebod) yang merupakan kewajiban umum untuk melakukan sesuatu; 2. Larangan (verbod) yang

merupakan kewajiban umum untuk tidak melakukan sesuatu; 3. Pembebasan (*vrijstelling, dispensatie*) berupa pembolehan khusus untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum diharuskan. 4. Izin (*toesteming, permissie*) berupa pembolehan khusus untuk melakukan sesuatu yang secara umum dilarang. Selanjutnya tugas kita sebagai insan kesehatan bersama masyarakat untuk mengawal pelaksanaan Undang-undang ini sekaligus mengawal dan mengkritisi pemerintah sehingga benar-benar menjadi suatu bentuk nyata upaya politik yang pro rakyat dan bermanfaat secara luas kepada masyarakat dan bangsa Indonesia yang tercinta

Dalam pandangan masyarakat kesehatan, persoalan kesehatan sarat dengan peraturan. Peraturan dimaksud dapat berupa peraturan perundangundangan yang berlaku umum dan berbagai ketentuan internal bagi profesi dan asosiasi kesehatan. Oleh karena itu persoalan kesehatan sesungguhnya⁵⁹ merupakan sub system dari system hukum. Agar diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh maka digunakan susunan 3 (tiga) komponen dalam suatu sistem hukum seperti yang dikemukakan Schuyt. Ketiga komponen dimaksud adalah keseluruhan peraturan, norma dan ketetapan yang dilukiskan sebagai sistem pengertian, betekenis sisteem, keseluruhan organisasi dan lembaga yang mengemban fungsi dalam melakukan tugasnya, *organisaties instellingen* dan keseluruhan ketetapan dan penanganan secara konkret telah diambil dan dilakukan oleh subjek dalam komponen kedua, *beslissingen en handelingen*. Dalam komponen pertama yang dimaksudkan adalah seluruh peraturan, norma dan prinsip yang ada dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan.

Bertolak dari hal tersebut dapat diklasifikasikan ada 2 (dua) bentuk, yaitu ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh penguasa dan ketentuan yang dibuat oleh organisasi profesi dan asosiasi kesehatan. Hubungan antara keduanya adalah ketentuan yang dibuat oleh organisasi profesi dan asosiasi kesehatan serta sarana kesehatan hanya mengikat ke dalam dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang dibuat oleh penguasa. Menurut inventarisasi yang dilakukan terhadap ketentuan yang dikeluarkan penguasa dalam bentuk peraturan perundang-undangan terdapat 2 (dua) kategori, yaitu yang bersifat menetapkan dan yang bersifat

mengatur. Dari sudutpandang materi muatan yang ada dapat dikatakan undang–undang kesehatan yang baru tahun 2009 telah mengandung 4 (empat) obyek, yaitu:

1. Pengaturan yang berkaitan dengan upaya kesehatan
2. Pengaturan yang berkaitan dengan tenaga kesehatan
3. Pengaturan yang berkaitan dengan sarana kesehatan
4. Pengaturan yang berkaitan dengan komoditi kesehatan. Selanjutnya dari ketentuan yang ada dalam keputusan dan peraturan yang dibuat oleh organisasi profesi dan asosiasi bidang kesehatan serta sarana kesehatan adalah mencakup kode etik profesi, kode etik usaha dan berbagai standar yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan.

Apabila diperhatikan prinsip-prinsip yang dikandung dalam ketentuan ini mencakup 4 (empat) prinsip dasar, yaitu autonomy, beneficence, non maleficencedan justice. Apabila diperhatikan dari ketentuan tersebut terkandung prinsip perikemanusiaan berdasarkan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama. Hal itulah yang menjadi denyut jantung dari UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ini.

C. Ketentuan Hukum Upaya Kesehatan

Upaya Kesehatan

1. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Penyelenggaraan upaya kesehatan yang dimaksud dalam hal ini mencakup:
 - Pelayanan kesehatan;
 - Pelayanan kesehatan tradisional ;
 - Peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit ;
 - Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan ;

- Kesehatan reproduksi ;
- Keluarga berencana ;
- Kesehatan sekolah ;
- Kesehatan olahraga ;
- Pelayanan kesehatan pada bencana ;
- Pelayanan daerah ;
- Kesehatan gigi dan mulut ;
- Penanggulangan gangguan pengelihatn dan gangguan pendengaran ;
- Kesehatan matra ;
- Pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan ;
- Pengamanan dan penggunaan makanan dan minuman ;
- Pengamanan zat adiktif ; dan / atau
- Bedah mayat.

Adapun mengenai tanggung jawab dari penyelenggaraan upaya kesehatan dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Pasal 49 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa : Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan upaya kesehatan. Selain itu untuk menyelenggarakan upaya kesehatan maka penyelenggaraan upaya kesehatan harus memperhatikan fungsi sosial budaya, moral dan etika profesi. Dan, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab meningkatkan dan mengembangkan upaya kesehatan. Upaya kesehatan sekurang-kurangnya memenuhi kebutuhan kesehatan dasar masyarakat, karenanya peningkatan dan pengembangan upaya kesehatan dilakukan berdasarkan pengkajian dan penelitian. Sedangkan ketentuan mengenai peningkatan dan pengembangan upaya kesehatan dilaksanakan melalui kerjasama antar pemerintah dan antar lintas sector⁴⁴. Upaya kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi individu atau masyarakat. Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud disini didasarkan pada standar pelayanan minimal kesehatan.

2. Pelayanan Kesehatan Pelayanan kesehatan ini terdiri atas pelayanan kesehatan perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan baik perseorangan maupun masyarakat dalam ketentuan ini meliputi kegiatan dengan

pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative. Adapun tujuan pelayanan kesehatan tersebut adalah

- Pelayanan kesehatan perseorangan ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga.
- Pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat
- Pelaksanaan pelayanan kesehatan harus mendahulukan pertolongan keselamatan nyawa pasien dibanding kepentingan lainnya.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan nondiskriminatif. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan seperti yang dimaksud diatas. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Selain itu pemerintah wajib menetapkan standar mutu pelayanan kesehatan.

Standar mutu pelayanan paling tidak harus dapat memenuhi dan melindungi kepentingan masyarakat, yaitu:

a. Perlindungan pasien

Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap. Akan tetapi menerima atau menolak ini tidak berlaku pada :

- 1) Penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular kedalam masyarakat yang lebih luas ;
- 2) Keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri ; atau
- 3) Gangguan mental.

b. Hak- hak pasien

Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi ini tidak berlaku dalam hal :

- 1) Perintah undang-undang;

- 2) Perintah pengadilan;
- 3) Izin yang bersangkutan;
- 4) Kepentingan masyarakat; atau
- 5) Kepentingan orang tersebut.

Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang di terimanya. Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud ini tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat. Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan ini diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

VII. TINDAK PIDANA TERORISME

Pengantar

Tindak pidana terorisme merupakan fenomena yang telah meresahkan masyarakat dunia, termasuk juga di Indonesia. Pasca pengeboman yang dilakukan di pantai Legian Kuta, Bali pada 12 Oktober 2002, secara beruntun terjadi berbagai ledakan di tempat lain termasuk di ibu kota negara. Selain itu berbagai peristiwa yang mengikuti rentetan pengeboman bunuh diri terjadi, telah memakan korban jiwa maupun harta benda yang tidak sedikit. Pemerintah Republik Indonesia seakan berpacu dengan gerakan terorisme termasuk di dalamnya separatisme maupun radikalisme dengan dalih mengatas namakan keagamaan tertentu, sehingga telah mengakibatkan ikatan-ikatan sosial menjadi merenggang.

Sub-Sub Materi:

- Pengertian
- Perkembangan Peraturan
- Program Deradikalisasi

Tujuan Pembelajaran

Dengan mempelajari tindak pidana korupsi ini diharapkan mahasiswa dapat memperoleh informasi yang seluas-luasnya mengenai definisi hukum pidana terorisme, Perkembangan peraturan tindak pidana terorisme, dan program deradikalisasi.

Indikator Hasil Evaluasi Pembelajaran

1. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Definisi hukum pidana khusus dari beberapa ahli hukum pidana.
2. Mahasiswa dapat menjelaskan Pengertian Tindak Pidana Terorisme
3. Mahasiswa dapat menjelaskan Perkembangan Peraturan dalam tindak pidana Kesehatan
4. Mahasiswa dapat menjelaskan Deradikalisasi

Metode Dan Strategi Proses Pembelajaran

- Metode Perkuliahan yaitu Problem Based Learning (PBL) pusat pembelajaran ada pada mahasiswa. Metode yang diterapkan adalah “belajar” (Learning) bukan “mengajar” (Teaching).
- Strategi pembelajaran : kombinasi pertemuan tatap muka 50 % (menjelaskan materi kuliah) dan tutorial 50 % (kemampuan mahasiswa berdiskusi dalam menulis tugas-tugas).
- Media instruksional dengan media yang ada dimanfaatkan seperti media papan tulis, computer, LCD.

Materi

A. Pengertian

Pengertian Terorisme adalah tindakan serangan-serangan yang terkoordinasi dengan bertujuan memberikan rasa perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat tertentu. Tindak pidana terorisme di samping berbagai bentuk radikalisme dan juga merupakan kejahatan yang tergolong pemberantasannya dilakukan secara luar biasa (*extra ordinary crime*). Di samping itu tindak pidana di atas merupakan kejahatan

terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) yang mendapat kutukan keras dari

setiap bangsabangsa di dunia. Terorisme dengan segala manifestasinya merupakan kejahatan yang serius dan mengancam nilai-nilai kemanusiaan, mengganggu keselamatan umum bagi orang dan barang bahkan sering ditujukan kepada instalasi negara atau militer/pertahanan keamanan, maupun kepada personifikasi yang menjalankan institusi negara seperti ditujukan kepada kepala negara, pemerintahan pada umumnya, objekobjek vital dan stategis maupun pusat-pusat keramaian umum lainnya. Orang-orang dari komunitas tertentu, sering menjadi korban-korban yang tidak berdosa karena menjadi sasaran kelompok teroris, sebagaimana pernah dilakukan oleh Amrozi dan kawan-kawan ketikamelakukan peledakan di Legian Bali pada tahun 2002. Para pelaku ketika itu menyatakan bahwa perbuatan yang mereka lakukan didasarkan kepada kebencian mereka kepada Amerika Serikat. Hal ini dapat dirunut kronologisnya sebab pengeboman di Bali tidak lama setelah terjadinya serangan terhadap menara kembar World Trade Centre (WTC) dan Penthaon pada 11 September 2002.

Semenjak peristiwa pengeboman di Bali itu, berturut-turut terjadi serangan di tempat-tempat vital seperti kedutaan besar AS di Jakarta, maupun bom bunuh diri yang terjadi di Hotel JW Marriot pada 5 Agustus 2003 yang menewaskan pelaku bom bunuh diri dan 12 orang lainnya, serta 150 orang mengalami luka-luka. Kedua peristiwa di atas merupakan contoh beberapa kasus terorisme yang pernah terjadi dan ditujukan kepada simbpo-simbol negara asing seperti AS. Begitu juga tindakan terorisme yang ditujukan kepada kepala negara sebagaimana pernah dinyatakan oleh mantan presiden Soesilo Bambang Yudhoyono bahwa beliau pernah menjadi sasaran penembakan kelompok tertentu terutama pada awal pemerintahannya pada tahun 2003.

Peristiwa yang cukup menggemparkan ibu kota adalah apa yang disebut dengan bom Thamrin yakni aksi sejumlah kelompok teroris yang meledakkan garai *Starbuck coffee* dan kantor polisi yang ada di depan gedung Sarinah Jakarta Pusat.

Aksi serangan dan dibalas dengan serangan oleh aparat kepolisian berakhir dramatis karena memakan korban jiwa beberapa orang baik dari kelompok teroris sendiri maupun dari pihak aparat keamanan. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tindak pidana terorisme merupakan ancaman terhadap nilai-nilai kemanusiaan di mana hukum merupakan salah satu sarana dalam upaya menanggulangnya.

Dalam tataran antara negara-negara, pemerintah Inggris diakui pertama sekali memberikan definisi tentang terorisme sehingga dapat dibedakan dengan aksi kriminal lainnya yakni terorisme diartikan sebagai penggunaan kekerasan untuk tujuan politik yang dilakukan oleh individu atau kelompok, atas nama atau menentang pemerintah yang sah, dengan menakuti-nakuti masyarakat yang lebih luas daripada korban diartikan sebagai teroris.

Menurut Konvensi PBB tahun 1989 menyatakan bahwa terorisme adalah segala bentuk tindakan kejahatan yang dilakukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas. Perkembangan jaman di era globalisasi dan informasi tanpa batas telah membuka pemahaman dan realitas bahwa tindak pidana terorisme merupakan kejahatan lintas negara (*Transnasional crime*) karena terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas, sehingga mengancam perdamaian dunia serta keamanan internasional khususnya keamanan nasional. Maka menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, memelihara keutuhan bangsa serta integritas nasional dan melindungi keamanan warga negara dari segala bentuk ancaman terorisme (Mulyana, T. S, Jimmy, 2017)

Secara khusus, pada tahun 2000 Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, di Wina Austria telah menggariskan secara khusus berkaitan dengan terorisme di Indonesia bahwa pertama secara khusus menyatakan bahwa mengutuk secara keras pengeboan di Pulau Bali serta menyampaikan duka dan simpati yang mendalam kepada pemerintah dan rakyat Indonesia juga kepada keluarga korban dan resolusi berupa seruan untuk bekerjasama, mendukung dan membantu pemerintah

Indonesia untuk menangkap dan mangungkap semua pelaku yang terkait dengan peristiwa tersebut dan memprosesnya ke pengadilan (Pandi Pradityo, 2016 : 17).

Dalam tataran politik, semenjak kemerdekaan berbagai bentuk terorisme telah terjadi di Indonesia baik ketika Orde Lama maupun Orde Baru, misalnya Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Bahkan di era sekarang telah timbul pula gerakangerakan yang mengusung ideologi keagamaan terutama Islam seperti Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) juga termasuk Ahmadiyah yang tidak jarang melakukan aksinya dengan menimbulkan suasana yang mencekam (teror) dalam melancarkan aksi-aksinya. Tentu saja kelompok-kelompok di atas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dipandang dan diletakkan dalam bingkai *the rule of law*.

Dalam buku *Root Causes of Terrorism: Myths, Reality, and Ways Forward*, Bjørgo, menawarkan sebuah tipologi yang dapat digunakan untuk memahami faktor faktor penyebab terorisme. Bjørgo membedakan antara dua kategori penyebab dalam tipologinya, yaitu *precondition softerrorism* dan *precipitants of terrorism*. *Preconditions* (prekondisi) adalah faktor-faktor yang menyediakan kondisi- kondisi yang dalam jangka panjang kemudian melahirkan terorisme. Sementara itu, *precipitants of terrorism* adalah peristiwa atau fenomena spesifik tertentu yang secara langsung mendahului atau memicu terjadinya sebuah tindak terorisme.

Kedua faktor ini dibagi lagi menjadi empat level sebagai berikut:

1. Faktor penyebab struktural, yaitu faktor-faktor penyebab yang memengaruhi kehidupan masyarakat ditingkat makro (abstrak), yang kemungkinan tidak disadari. Beberapa faktor struktural yang dikemukakan Bjorgo antara lain ketidak seimbangan emografik, globalisasi, modernisasi yang sangat cepat, transisi masyarakat, meningkatnya individualisme dan ketercerabutan dari akar serta keterasingan dalam masyarakat (atomisasi),struktur kelas, dsb.
2. Faktor penyebab fasilitator (akselerator), yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terorisme menjadi pilihan menarik untuk dilakukan, meskipun bukan pendorong utama terjadinya terorisme. Contoh-contoh penyebab di level ini antara lain perkembangan media massa di era modern, perkembangan

transportasi, teknologi persenjataan, lemahnya kontrol negara atas wilayahnya, dan sebagainya.

3. Faktor penyebab motivasional, yaitu ketidakpuasan aktual (*grievances*) yang dialami di tingkat personal, yang memotivasi seseorang untuk bertindak. Para ideolog atau pemimpin politik mampu menerjemahkan penyebab-penyebab dilevel struktural dan membuatnya relevan ditingkat motivasional melalui ideologi-ideologi sehingga dapat menggerakkan orang-orang untuk bergerak.
4. Faktor pemicu, yaitu penyebab langsung terjadinya tindak teroris. Faktor pemicu dapat berupa terjadinya peristiwa yang provokatif atau peristiwa politik tertentu atau tindakan yang dilakukan oleh pihak musuh yang menimbulkan reaksi tertentu.

Dengan menggunakan tipologi di atas, artikel ini akan berusaha menjawab bagaimana interaksi antara kondisi domestik dan situasi internasional pada masa Orde Baru dapat berkontribusi sebagai penyebab terorisme di Indonesia. Masalah ini membatasi lingkup pembahasan pada kondisi domestik dan situasi internasional masa Orde Baru sebagai faktor-faktor struktural, fasilitator (akselerator) dan juga motivasional penyebab aksi terorisme oleh anggota kelompok tertentu yang telah bertanggung jawab dalam serangkaian peristiwa terorisme di Indonesia serta sesaat pasca masa Orde Baru, yakni tahun 1998 hingga 2001 sebagai rentang waktu di mana faktor pemicu yang pada akhirnya membuat anggota kelompok Jamaah Islamiyah melakukan aksi terorisme di mana-mana.

Pada waktu yang bersamaan pemikiran-pemikiran radikalisme mulai mengecambah dalam kelompok tertentu, terutama mereka yang telah mendapatkan pelatihan di luar atau di dalam negeri. Semenjak saat itu terjadi pengeboman terhadap fasilitas publik, simbol-simbol negara dan personifikasinya yang juga diwarnai dengan aksi bom bunuh diri.

Pendekatan deradikalisasi merupakan penyeimbang dari pendekatan penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penanggulangan kejahatan dengan pendekatan penal). Melalui Pendekatan nonpenal maka tindakan represif terhadap radikalisme dan berbagai bentuk terorisme dilakukan dari hulunya yakni dimulai dari akar penyebab tumbuhnya

berbagai pikiran radikalisme dan usaha untuk menanggulangnya dengan tanpa menggunakan hukum pidana.

B. Program Deradikalisasi

Deradikalisasi adalah suatu upaya mereduksi kegiatan-kegiatan radikal dan menetralisasi paham radikal bagi mereka yang terlibat teroris dan simpatisannya serta anggota masyarakat yang telah terekspose paham-paham radikal tertentu (Sb, 2016). Tujuan umum deradikalisasi adalah untuk membuat para teroris atau kelompok yang melakukan kekerasan bersedia meninggalkan atau melepaskan diri mereka dari aksi dan kegiatan teroris. Secara khusus tujuan deradikalisasi adalah pertama, membuat para teroris mau meninggalkan aksi terorisme dan kekerasan. Kedua kelompok radikal mendukung pemikiran yang moderat dan toleran. Ketiga, kaum radikal dan teroris dapat mendukung program-program nasional dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Program deradikalisasi terorisme harus juga diikuti dengan program deideologisasi di mana menurut Petrus Golose negara berupaya melepaskan ideologi-ideologi dari dalam diri teroris, ataupun menghentikan proses penyebaran ideologi. Program ini disebut dengan deideologisasi. Dengan demikian, deideologisasi adalah suatu upaya untuk menghentikan proses pemahaman dan penyebaran ideologi Islam radikal yang dimiliki oleh kelompok teroris. Sehingga deideologisasi menjadi kunci utama dalam menyadaran atau proses reorientasi pemikiran teroris agar dapat kembali kepada pemahaman Islam yang hakiki.

Program deradikalisasi memiliki karakteristik yang sama hampir di setiap negara yakni ((CTITF), n.d.):

- a. Pelibatan dan kerja sama dengan masyarakat umum,
- b. Pelaksanaan program khusus dalam penjara,
- c. Program pendidikan
- d. Pengembangan dialog lintas budaya,
- e. Pengupayaan keadilan sosial dan ekonomi,
- f. Kerja sama global dalam penanggulangan terorisme,
- g. Pengawasan terhadap cyber terorisme

- h. Perbaikan perangkat perundang-undangan,
- i. Program rehabilitasi,
- j. Pengembangan dan penyebaran informasi baik regional, dan
- k. Pelatihan serta kualifikasi para agen yang terlibat di dalam melaksanakan kebijakan kontra radikalisme.

Melalui program deradikalisasi dan deideologisasi ini diharapkan memiliki peran guna melepaskan ideologi yang dianut oleh teroris dan menggantikannya dengan ideologi Pancasila. Dengan demikian, proses pemidanaan yang diberikan kepada tahanan dan napi harus mencakup aspek penyembuhan baik secara mental, fisik dan sosial. Program deradikalisasi yang persuasif menurut Petrus dapat mengatasi keterbatasan hukum pidana. Program tersebut juga tidak akan berbenturan dengan Hak Asasi Manusia yang telah dilindungi oleh hukum nasional dan internasional. Sementara program yang sifatnya sosial dapat diberikan kepada orang-orang yang belum melakukan tindak pidana, atau kepada anggota masyarakat yang menjadi simpatisan dan belum terlibat aksi terorisme atau anggota organisasi teroris itu sendiri. Mereka harus segera dilibatkan dalam program deradikalisasi terorisme, hal ini menjadi penting untuk mengeliminasi bahaya lain terorisme.

Program deradikalisasi terhadap tahanan dan narapidana mempunyai beberapa tujuan yakni (Zuhri, 2017):

- Melakukan counter-terrorism
- Mencegah proses radikalisme
- Mencegah provokasi, penyebaran kebencian, permusuhan antar umat beragama
- Mencegah masyarakat dari indoktrinasi radikalisme
- Meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk menolak paham teror
- Memperkaya khazanah atas perbandingan paham

Dengan mengutip pandangan Sarlito Wirawan, Petrus Golose menyatakan bahwa para teroris bukanlah orang yang mengalami problem kejiwaan, seperti psikopat, melainkan manusia normal. Oleh karena itu, penanganannya pun baik, apabila dilakukan lewat pendekatan kemanusiaan yang wajar. Beberapa pendekatan tersebut yakni *soul approach*, sebagai metode dalam deradikalisasi dengan tujuan

reorientasi pemikiran lewat unsur budaya Islam, tanpa paksaan dan tanpa kekerasan.

Proses reorientasi itu sendiri merupakan konversi atau membalikkan pemikiran radikal menjadi tidak radikal dengan menekankan pada perbaikan nilai-nilai moral. Dengan reorientasi dimaksudkan adalah :

- a) Pemikiran berorientasi pada kematian, atau berjihad dengan cara bom bunuh diri atau berperang di medan tempur digantikan menjadi pemikiran yang cinta kepada kehidupan yang damai serta sejahtera sebagaimana tujuan dari pelaksanaan ajaran agama Islam,
- b) Pemikiran meninggalkan keluarga digantikan dengan pemikiran ingin bertanggung jawab untuk keluarga.

Dalam tingkat penyidikan misalnya, pendekatan kejiwaan itu diwujudkan dengan cara sebagai berikut :

1. Penyidik tidak melakukan tindak kekerasan terhadap tahanan
2. teroris,
3. Penyidik berupaya menggunakan subkultur organisasi teroris dalam berbahasa, berperilaku termasuk dalam memberikan salam agar jarak antaraa penyidik dengan teroris semakin dekat,
4. Penyidik turut terlibat dalam ritual keagamaan dengan sesama tahanan teroris seperti sholat berjamaah, mengaji, membahas Al-Qur'an,
5. Penyidik memberikan perlakuan yang sama terhadap tahanan, makan minum, tempat duduk, dan diupayakan tidak ada pembedaan,
6. Adanya role model dari tahanan teroris yang telah sadar untuk menyadarkan tahanan teroris yang baru,
7. Tahanan teroris yang baru disatukan selnya bersamatahan teroris yang telah lebih dahulu mengikuti program deradikalisasi agar menjadi transfer pemahaman non radikal,
8. Kunjungan keluarga tahanan teroris diperbolehkan dan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku,
9. Keluarga tahanan teroris diberi santunan untuk dapat bertahan hidup,
10. Masing-masing tahanan teroris mempunyai mentor, dan

11. Kujungan tahanan teroris ke seminar, pesantren dan kegiatan ekonomi.

Baik program deradikalisasi maupun deideologisasi merupakan upaya agar pelaku dapat menyadari bahwa perbuatannya adalah salah oleh karena itu dengan kesadaran sendiri dengan difasilitasi oleh negara bersedia untuk kembali kepada ajaran Islam yang benar, menjauhkan diri dari berbagai bentuk tindakan yang konfrontatif dan meyakini bahwa agama maupun ideologi Pancasila merupakan keyakinan yang luhur dan harus diamalkan demi kebaikan bersama dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bagaimana pun, pemberantasan tindak pidana terorisme maupun tindak pidana radikalisme yang bernuansa agama maupun ideologi harus diletakkan dalam konteks hukum positif dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip *the rule of law*. Asas praduga tidak bersalah merupakan prinsip fundamental dalam hukum acara pidana harus dihormati, artinya selama terduga teroris belum terbukti secara meyakinkan melalui sidang pengadilan yang fair, maka hak-haknya sebagai tersangka harus dihormati.

Menembak mati terduga teroris bukan merupakan solusi yang tepat karena dapat menyebabkan sel-sel terorisme menjadi terputus sehingga tidak dapat digali akar penyebab terjadinya terorisme maupun radikalisme ini. Penegakan hukum dalam rangka terorisme hendaklah mengacu kepada ketentuan hukum positif maupun kondisi faktual yang dihadapi pada satu saat.

Penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana terorisme dapat dilakukan secara formal melalui SPP, atau secara informal yang dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi tindak pidana tanpa menggunakan jalur pidana (penal) dan non formal melalui deradikalisasi maupun deideologisasi agar pemberantasan terorisme dapat dilakukan secara terintegrasi (Zaidan, 2017). Penegakan hukum secara non formal ini mengundang peranan aktif lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan seperti sekolah-sekolah, pesantren hingga universitas. Begitu juga tokoh masyarakat seperti alim ulama, tokoh politik maupun warganegara pada umumnya dapat memberikan kontribusinya dalam bidang masing-masing untuk menjadi penangkal berbagai bentuk terorisme.

Penegakan hukum secara informal maupun non formal tentu tidak memberi ruang untuk terjadinya tindakan main hakim sendiri, karena apabila hal itu terjadi maka prinsip-prinsip *therule of law* telah dilanggar. Ketika isu bangkitnya paham komunisme yang dihembuskan akhir-akhir ini, hendaklah diletakkan dalam bingkai penegakan hukum. Orang-orang yang ditengarai melakukan kegiatan untuk menghidupkan ideologi yang telah dilarang tersebut harus diberi sanksi hukum. Kita telah menyepakati bahwa paham komunisme tidak dapat hidup di bumi Pancasila dengan landasan hukum Ketetapan MPRS Nomor XXV Tahun 1966 maupun berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, yang kemudian dimasukkan dalam KUHP dengan menambah ketentuan dalam Pasal 107.

Pelibatan TNI dalam upaya penanggulangan terorisme harus diletakkan dalam perspektif hukum positif di Indonesia saat ini. Salah satu undang-undang yang harus diperhatikan adalah Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) di mana dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Juga ditentukan dalam Pasal 7 bahwa :

1. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
2. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a) Operasi militer untuk perang.
 - b) Operasi militer selain perang, yaitu untuk: 1. mengatasi gerakan separatisme bersenjata;
 - c) mengatasi pemberontakan bersenjata;
 - d) mengatasi aksi terorisme;

- e) mengamankan wilayah perbatasan;
 - f) mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
 - g) melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
 - h) mengamankan Presiden dan wakil presiden beserta keluarganya;
 - i) memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
 - j) membantu tugas pemerintahan di daerah;
 - k) membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
 - l) membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
 - m) membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
 - n) membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta
- membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

C. Perkembangan Peraturan

Latar Belakang

Lahirnya UU No 15 tahun 2003 yang berisi tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang tidak ada tujuan lain kecuali untuk mewujudkannya tujuan nasional sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan. Di samping itu, bahwa rangkaian peristiwa pemboman

yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, dan kerugian harta benda, sehingga menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Internasional. Selain itu, bahwa terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan (network) yang luas, sehingga pada gilirannya akan mengancam perdamaian dan keamanan nasional dan Internasional. Oleh sebab itu, sebagai upaya untuk memulihkan kehidupan masyarakat yang tertib, dan aman serta untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi permasalahan yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, maka dengan mengacu kepada konvensi Internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang berkait dengan terorisme, diperlukan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan setelah itu ditetapkan di dalam sebuah Undang-Undang.²⁰ Sebagai latar belakang filosofis dilakukannya pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia yang merupakan sebuah kebijakan dan langkah antisipatif yang bersifat proaktif yang dilandaskan kepada azas kehati-hatian (al-ihtiyat) dan bersifat jangka panjang, antara lain:

Pertama, Masyarakat Indonesia adalah masyarakat multi etnik dengan beragam dan mendiami ratusan ribu pulau-pulau yang tersebar di seluruh wilayah nusantara serta ada yang letaknya berbatasan dengan negara lain.

Kedua, Dengan karakteristik masyarakat Indonesia tersebut seluruh komponen bangsa Indonesia berkewajiban untuk memelihara dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi segala bentuk kegiatan yang merupakan tindak pidana terorisme yang bersifat Internasional.

Ketiga, Konflik-konflik yang terjadi belakangan ini sangat merugikan bangsa dan negara serta merupakan kemunduran peradaban dan dapat dijadikan tempat yang subur berkembangnya tindak pidana terorisme yang bersifat Internasional, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun yang dilakukan oleh orang asing.

Keempat, Terorisme yang bersifat Internasional merupakan bentuk kejahatan yang terorganisasi, sehingga pemerintah dan bangsa Indonesia wajib

meningkatkan kewaspadaan dan bekerja sama memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kelima, Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia tidak merupakan masalah hukum dan penegakan hukum, melainkan juga merupakan masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa. Sehingga kebijakan dan langkah pencegahan dan pemberantasannyapun ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan Negara, hak asasi korban dan saksi, serta hak asasi tersangka, dan atau terdakwa. (Soeady, 2003)

Berdasarkan beberapa nilai filosofis tersebut di atas, lahir dan hadirnya UU No. 15 tahun 2003 yang berisi tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang secara khusus dan spesifik menjadi hal yang amat strategis untuk mengantisipasi dan memberantas berbagai bentuk tindak pidana terorisme yang akan mengancam keamanan, ketentraman, dan keutuhan seluruh rakyat di bawah Negara kesatuan Republik Indonesia.

Di samping itu, sebagaimana lahirnya UU No. 15 Tahun 2003, maka lahir pula UU No. 16 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada peristiwa peledakan bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 menjadi Undang-Undang.

Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hukum lahirnya UU No. 16 Tahun 2003 ini, yaitu: Pertama, Bahwa peristiwa pemboman di Bali pada tanggal 2 Oktober 2002 telah menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas serta mengakibatkan hilangnya nyawa dan kerugian harta benda. Kedua, Bahwa peristiwa pemboman yang terjadi di Bali telah membawa dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Internasional serta mengancam perdamaian dan keamanan Internasional, sehingga PBB mengeluarkan resolusi Nomor 1438 (2002) dan resolusi Nomor 1371 (2001). Ketiga, Bahwa untuk memberi landasan hukum yang kuat dalam mengambil langkah-langkah segera dalam rangka penyelidikan-penyelidikan dan penuntutan

atas peristiwa pemboman yang terjadi di Bali, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan PERPU No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober Tahun 2002.²²

Berdasarkan beberapa pertimbangan hukum diatas, kehadiran UU No. 16 tahun 2003 begitu sangat signifikan untuk mengembalikan rasa aman, dan memberikan perlindungan kepada segenap masyarakat Indonesia, sehingga memberikan dampak positif bagi perkembangan sosial, ekonomi dan politik, serta hubungan dengan dunia Internasional.

Undang-undang

UU No. 15 Tahun 2003 mengatur tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindakan terorisme menjadi UU yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia (DPR RI), pada tanggal 4 April tahun 2003. UU No. 15 Tahun 2003 hanya berisi dua pasal, yang terdiri dari 2 pasal. Pasal 1 berbunyi: “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232) ditetapkan menjadi Undang-Undang.”

Pasal 2: Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatkannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia. Sementara itu, Perpu No. 1 Tahun 2002 yang ditetapkan menjadi UU terdiri dari 8 bab 47 pasal dengan sistematikanya sebagai berikut:

Bab I: Tentang Ketentuan Umum, yang terdiri dari dua pasal. Pasal 1 berisi tentang 12 pengertian dari istilah yang dipergunakan dalam UU ini. Pasal 2 berisi tentang tujuan dan signifikasi dari UU ini yang berbunyi: “Pemberantasan tindak pidana terorisme dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini merupakan kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk memperkuat ketertiban masyarakat, dan keselamatan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hukum

dan hak asasi manusia, tidak bersifat diskriminatif baik berdasarkan suku, agama, ras, maupun antar golongan.”

Bab II: Lingkup berlakunya UU, yang terdiri dari 5 pasal. Pasal 3 mengatur tentang ruang lingkup berlakunya terdiri dari 2 ayat. Ayat 1 mengatur tentang ruang lingkup berlakunya, yaitu: “Terhadap setiap orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana terorisme di wilayah Negara Republik Indonesia dan/atau di Negara lain juga mempunyai yurisdiksi dan menyatakan maksudnya untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tersebut.” Ayat 2 yang mengatur tentang Negara lain yang mempunyai yurisdiksi. Pasal 4 mengatur tentang lingkup UU ini juga tentang warga Negara RI yang berada di luar wilayah RI, terhadap fasilitas RI di luar negeri, dan yang lainnya. Pasal 5 mengatur bahwa tindak pidana terorisme dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, dan tindak pidana yang mempunyai motif dan tujuan politik.

Bab III: Esensi Tindak Pidana Terorisme, yang terdiri dari Pasal 6 mengatur tentang rumusan delik tindak pidana terorisme, bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pasal 7, mengatur tentang tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.

Pasal 8, memperkuat pasal 6 yang memuat tentang 18 delik yang dikategorikan sebagai tindakan terorisme. Pasal 9, memuat hal-hal yang berkait

dengan senjata api, bahan peledak, dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 10, mengatur tentang pelaku yang dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, mikroorganisme, radioaktif, dan yang lainnya. Pasal 11, mengatur tentang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan ancaman pidana 3 tahun dan paling lama 15 tahun.

Pasal 12, dengan ancaman hukuman yang sama (seperti pasal 11) mengatur tentang mengumpulkan harta kekayaan untuk mengadakan fasilitas melakukan tindakan terorisme. Pasal 13, dengan ancaman hukuman yang sama (pasal 11 dan 12) bagi pihak yang memberikan bantuan atau kemudahan untuk melakukan tindakan terorisme.

Pasal 14, mengatur terhadap setiap orang yang merencanakan, dan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme. Pasal 15, mengatur tentang setiap orang yang melakukan terorisme. Pasal 16, mengatur tentang: setiap orang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme.

Pasal 17, mengatur tentang tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh/atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Pasal 18, berkait dengan teknis penyerahan surat panggilan, dan pidana denda maksimal Rp. 1000.000.000.000,- (satu Triliun Rupiah), serta korporasi tersebut dicabut izinnya. Pasal 19, mengatur tentang pidana minimal, pidana seumur hidup, dan atau pidana mati, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia 18 tahun.

Bab IV: Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme, terdiri dari 5 pasal. Pasal 20, memuat setiap orang yang menghalangi proses persidangan peradilan terorisme dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan intimidasi terhadap penyelidik, penyidik, penuntut umum, penasihat hukum, dan atau hakim dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3

(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Pasal 21, mengatur tentang setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, alat bukti atau barang bukti palsu, dan mempengaruhi secara melawan hukum di sidang pengadilan, atau melakukan penyerangan terhadap saksi, atau terhadap petugas peradilan dengan sanksi pidana, paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Pasal 22, mengatur tentang setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dipidana. Pasal 23, mengatur tentang setiap saksi dan orang lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 2, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun. Pasal 24, penjatuhan pidana minimum sebagaimana dimaksud pada pasal 20, 21, 22, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia 18 tahun.

BAB V: Penyidikan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdiri dari 10 pasal, yaitu: pasal 25, mengatur tentang penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku (ayat 1). Sedangkan ayat 2, mengatur tentang: untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 6 (enam) bulan. Pasal 26: mengatur tentang: untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelejen. Penetapan bahwa sudah dapat bukti permulaan harus dilakukan proses pemeriksaan oleh ketua atau wakil ketua Pengadilan Negeri, dan dilakukan secara tertutup dalam jangka waktu 3 (tiga) hari. Setelah itu, ketua pengadilan negeri segera memerintahkan dilaksanakan penyidikan. Pasal 27, memuat tentang alat-alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme, meliputi: alat bukti sesuai dengan yang dimaksud oleh hukum acara pidana, alat bukti dalam bentuk informasi secara elektronik, data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dalam bentuk: tulisan, suara atau gambar, peta, foto, huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca dan memahaminya. Pasal 28, memuat bahwa penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga

keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk paling lama 7 x 24 jam. Pasal 29, memuat tentang wewenang penyidik, penuntut umum, atau hakim memerintahkan kepada bank atau lembaga jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap kekayaan yang merupakan hasil dari tindakan terorisme.

Pasal 30, untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana terorisme, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan dari Bank atau lembaga jasa keuangan tentang kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diketahui melakukan tindak pidana terorisme.

Pasal 31, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya, serta menyadap pembicaraan melalui pos atau jasa pengiriman lainnya, serta menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme atas perintah ketua pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 32, memuat tentang saksi. Dalam pemeriksaan saksi memberikan keterangan tentang terhadap apa yang dilihat dan dialami sendiri dengan bebas dan tanpa tekanan. Pasal 33, memuat tentang saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa beserta keluarganya dalam perkara pidana tindak pidana terorisme wajib mendapat perlindungan dari Negara atas berbagai ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. Pasal 34, perlindungan dilakukan oleh aparat penegak hukum, dan aparat keamanan, dalam bentuk: perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental, kerahasiaan identitas saksi, pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka. Pasal 35, memuat tentang dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa. Pasal 36, mengatur tentang korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi. Pasal 37, memuat bahwa setiap orang berhak memperoleh rehabilitasi

apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 38, memuat tentang pengajuan konvensasi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada menteri keuangan berdasarkan amar putusan pengadilan negeri. Pasal 40, memuat tentang pelaksanaan pemberian konvensasi dan/atau restitusi dilaporkan oleh menteri keuangan, pelaku, atau pihak ketiga kepada ketua pengadilan yang memutus perkara. Pasal 41, memuat tentang pelaksanaan pemberian konvensasi dan/atau restitusi kepada pihak korban melampaui batas, korban ahli warisnya dapat melaporkan hal tersebut kepada pengadilan. Pasal 42, memuat tentang dalam hal pemberian konvensasi dan/atau restitusi dapat dilakukan secara bertahap maka setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan dilaporkan kepada pengadilan.²⁵

Bab VII: Kerjasama Internasional, terdiri dari 1 (satu) ayat, yaitu: pasal 43, memuat tentang dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, pemerintah melaksanakan kerja sama internasional dengan Negara lain dalam bidang intelejen, kepolisian dan kerja sama teknisnya yang berkaitan dengan tindakan melawan terorisme.

Bab VIII: ketentuan Penutup, yang terdiri dari 4 (empat) pasal, yaitu: Pasal 44, yang mengatur tentang kewenangan atasan yang berhak menghukum. Pasal 45: memuat tentang presiden dapat mengambil langkah-langkah untuk merumuskan kebijakan dan langkah-langkah operasional pelaksanaan Perpu tindak pidana terorisme. Pasal 46: memuat tentang Perpu ini tidak dapat diperlakukan surut untuk tindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum mulai berlakunya Perpu ini, yang penerapannya ditetapkan dengan UU dan Perpu sendiri. Pasal 47: memuat tentang Perpu ini mulai berlaku sejak diundangkan. UU ini ditetapkan oleh presiden RI pada tanggal 18 Oktober 2002.

I. DAFTAR PUSTAKA

- (CTITF), C.-T. I. T. F. (n.d.). *First Report of Working Group on Radicalisation and Extremism that Lead to terrorism: Inventory of State programmes*.
- Adji, O. S. (1976). *Hukum Acara: Pidana dalam Prospekti* (Cetakan ke). Erlangga.
- Akbari, A. R. (2014). *Polemik Penyusunan Rancangan KUHP: Kesesatan Berfikir terhadap Konsep Kodifikasi Prinsip Lex Specialis, dan Klasifikasi Tindak Pidana*.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Kartun. S, H. (2003). *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Ekonomi Dengan Undang-undang No. 7/DRT/1955* (pp. 41 & 42). Universitas Diponegoro.
- Khotibul, A. B. dan U. (2009). *Komisi Pemberantasan Korupsi*. Pustaka Yustisia.
- KPK. (2014). *Buku Saku Memahami Gratifikasi*.
- Lamintang, P. A. F. (1984). *Hukum Penitensier Indonesia. Bandung: Alumni*, 4.
- Moeljatno. (1980a). *Asas-asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press*, 1.
- Moeljatno. (1980b). *Asas-asas Hukum Pidana*. 86.
- Mulyana, T. S, Jimmy, Y. (2017). *Definisi Terorisme: Pandangan Matakin Berkaitan Dengan Definisi Terorisme*.
<http://www.spocjournal.com/hukum/563-definisi-terorisme-pandangan-matakin-berkaitan-dengan-definisi-terorisme.html>.
- Nurdjana, I. G. M. (2005). *Korupsi dalam praktik bisnis: pemberdayaan penegakan hukum, program aksi dan strategi penanggulangan masalah korupsi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sb, A. (2016). *Deradikalisasi Nusantara*. Jakarta: Daulat Press.
- Soeady, S. (2003). *Perpu I/2002 Terorisme ditetapkan Presiden Megawati*. Durat bahagia.
- Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum. Jakarta: Rineka Cipta*, 5, 92.
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I. Semarang: Yayasan Sudarto*, 9.
- Verhezen, P. (2003). From a culture of gift exchange to a culture of exchanging gifts. *Jurnal Antropologi*, 27(72), 101–115.
- Zaidan, M. A. (2017). *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan*

Kebijakan Kriminal). *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 3(1), 149–180.

Zuhri, S. (2017). *Deradikalisasi Terorisme*. Daulat Press.